

MENGAPA INDONESIA SANGAT RAWAN DARI ISIS/IS?

Why Indonesia Is So Vulnerable From ISIS/IS?

Poltak Partogi Nainggolan

Peneliti Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Alamat e-mail: pptogin@yahoo.com

Naskah Diterima: 12 Agustus 2016

Naskah Direvisi: 6 Oktober 2016

Naskah Disetujui: 4 November 2016

Abstract

The increasing attacks of Indonesian pro-ISIS/IS (Islamic State in Iraq and Suriah/Islamic State) terrorists has stirred questions on why their influences can easily spread and so vulnerable in Indonesia? This essay is developed from 2016 descriptive-analytical research conducted in Jakarta, Palu, Poso, and Aceh. Data was collected from library studies and in-depth interviews with terrorism experts, academicians, and security apparatus in respected cities. Data has been further analyzed by exercising qualitative method. Research findings revealed that ISIS/IS recruits or followers in Indonesia join the terrorist group for economic reason due to the rising increase of poverty, economic gap and social injustice. The success of recruitments has also helped by geographical and demographical reasons, as well as weak and inconsistent law enforcement and the success of ISIS/IS international radicalization and terrorism campaign using social media. The writer then recommends poverty elevation and amendments of anti-terrorism law and better improvement of law enforcement, in addition to the need to push deradicalization campaign.

Keywords: ISIS/IS, Indonesia, terrorism, Sarinah Bombing, Poso, Aceh.

Abstrak

Maraknya pengaruh dan serangan ISIS/IS di Indonesia dewasa ini telah memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia menjadi sangat rawan atas serangan aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS? Esai ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptis-analitis, yang dilakukan di daerah Jakarta, Palu, Poso, dan Aceh pada tahun 2016. Di samping studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para ahli terorisme dan aparat keamanan di wilayah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkap banyaknya orang yang bergabung dengan ISIS/IS di Indonesia karena alasan ekonomis, geografis, demografis, maraknya kampanye radikal untuk melakukan aksi-aksi terorisme di media sosial, serta kekosongan dan lemahnya penegakan hukum di tanah air. Penulis merekomendasikan upaya pengentasan kemiskinan, pembuatan Undang-undang anti-terorisme dan penegakan hukum yang lebih baik dan konsisten, selain perlunya kampanye deradikalisasi.

Kata kunci: ISIS/IS, Indonesia, terorisme, Bom Sarinah, Poso, Aceh.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejak kedatangan pemimpin mereka dari Suriah tahun 2015, para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS di Indonesia mulai memperlihatkan aktivitas mereka dalam

mempersiapkan dan melakukan aksi-aksi terorisme. Setahun sebelumnya, pada tahun 2014, pengikut ISIS/IS di Indonesia telah mendeklarasikan kesetiaannya kepada Pemimpin ISIS/IS (*Kholifah Almuslimin*), Abu Bakr al-Baghdadi, tahun 2014.¹ Setelah kematian pemimpin Al-Qaeda, Osama bin

¹ Keterangan Kepala Polisi Kerajaan Malaysia, Khalid Abu Bakar, lihat Fedina S. Sundaryani and Tama Salim, "Alleged Indonesian IS recruiter arrested in Malaysia," *The Jakarta Post*, December 7, 2015, h. 4.

Laden, dan perancang operasi, Anwar al-Awlaqi, pada tahun 2011, serta komandan lapangannya, Abu Musab al-Zarkawi, pada tahun 2006, aksi-aksi terorisme internasional yang dilakukan organisasi penerusnya, terutama ISIS/IS, tidak bergantung pada kehadiran dan komando seorang pemimpin sentral.² Namun, aparat keamanan, dari kalangan intelijen dan Polri, telah berhasil mendeteksi dan kemudian menggagalkan ancaman serangan terorisme internasional dari jaringan ISIS/IS di Indonesia, seperti terhadap Abdul Karim alias Abu Jundi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya rencana serangan terhadap Markas Besar Kepolisian Daerah Metro Jaya.³ Sembilan terduga teroris pengikut ISIS/IS telah ditangkap di Tasikmalaya, Banjar, Gresik, Kota dan Kabupaten Mojokerto, serta Sukoharjo selama bulan Desember 2015, bersama barang bukti peralatan aksi mereka dan peta kota-kota yang akan menjadi sasaran aksi, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka adalah Abu Jundi dan Kelompok Abdul Karim yang mempunyai kemampuan membuat bom dan berasal dari Sumatera Barat, Pekanbaru, dan beberapa daerah di Jawa. Mereka rencananya akan membuat bom di Bandung dan meledakkannya pada malam tahun baru di Jakarta, dengan 2 pelaku bom bunuh diri.⁴

Aparat keamanan juga berhasil mencegah 9 aksi teror lainnya di wilayah Indonesia, dan Detasemen Khusus Anti-Terror (Densus 88) mereka, berhasil menangkap 16 anggota dan pendukung ISIS/IS di kota-kota besar seperti Jakarta, Solo, Malang, dan Makassar. Densus 88 juga telah menangkap 74 terduga teroris,⁵ yang 65

orang di antaranya telah diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka serangan terorisme pro-ISIS/IS. Di Poso, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT),⁶ yang telah menyatakan dukungan mereka pada ISIS/IS di bawah pimpinan Santoso, telah melancarkan perang kepada aparat keamanan setempat. Aparat keamanan pun telah menggelar aksi anti-teroris dengan nama Operasi Camar I, II, III, dan IV, yang bersama TNI, kemudian melanjutkannya dengan Operasi Tinombala, dan berhasil menembak mati Santoso di Poso pada 18 Juli 2016.⁷ Sebanyak 24 orang pengikut Santoso telah ditangkap hidup-hidup, dan 7 tewas, dalam kontak senjata dengan aparat keamanan, ditambah dengan 2 lagi tewas pada saat kontak senjata yang menewaskan Santoso. Tiga polisi tertembak dan 4 luka-luka. Sebanyak 5 senjata M-16, 35 bom rakitan, dan amunisi aktif telah disita dalam operasi pengejaran Santoso sebelumnya.

Sebanyak 32 anggota Kelompok MIT dan 3 perempuan isteri pimpinan MIT (Santoso, Basri, Ali Kalora), yang akan balas dendam atas kematian suami-suami mereka, telah bergabung dengan ISIS/IS. Rawannya ancaman ISIS/IS tercermin pula dari telah ditangkapnya 6 orang anggota teroris jaringan MIT di Poso, Malino, dan Ampana, Sulawesi Tengah pada Desember 2015, dalam operasi gabungan Polri dan TNI.⁸ Juga, dalam Operasi Tinombala sebelum tertembaknya Santoso, aparat keamanan

pergantian tahun 2015/2016. Lihat, "Penangkapan Terus Dilakukan pada 2016," *Kompas*, 4 Januari 2016, h. 5.

² Lihat, Ikhwaniul Kiram Mashuri, "Kesalahan Diagnosis yang Melahirkan ISIS," *Republika*, 7 Desember 2015, h. 9.

³ Lihat, "Terduga Teroris Ancam Ledakkan Jakarta," *Koran Tempo*, 21 Desember 2015, h. 1.

⁴ Lihat, "Polisi Tangkap "Calon Pengantin" di Tahun Baru," *Koran Jakarta*, 21 Desember 2015, h. 1.

⁵ Ini termasuk 10 terduga teroris yang ditangkap pada 18-23 Desember 2015, terkait rencana aksi teror. Mereka kelompok pro-ISIS/IS Solo, yang akan melancarkan serangan menjelang perayaan Kemerdekaan RI, dan kelompok pro-ISIS/IS Tasikmalaya yang merencanakan aksi terorisme menjelang Natal, serta 1 orang pengikut ISIS/IS di Bekasi yang berencana melakukan aksi terorisme pada

⁶ Ini kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Indonesia Timur, untuk membedakannya dengan Mujahidin Indonesia Barat (MIB), yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian Barat.

⁷ Wawancara dengan Danrem Tadulako dan Kabinda Poso di Rumah Bupati Poso pada 21 Juli 2016.

⁸ Wawancara dengan Kompol Fadly, Kepala Koordinasi Sekretaris Pimpinan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016. Juga, wawancara dengan Kompol Malsukri, dari Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) di Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016. Lihat pula, Ruslan Sangaji, "E. Indonesia Mujahidin member nabbed," *The Jakarta Post*, January 2, 2016, h. 2.

gabungan berhasil melumpuhkan 15 orang pengikut Santoso, 11 orang di antaranya tewas, dan 4 ditangkap hidup-hidup.⁹

Di awal tahun 2016, yaitu 14 Januari, telah terjadi aksi serangan teroris pro-ISIS/IS di kawasan Sarinah-Thamrin. Aksi serangan berangsur sekitar 3 jam, namun cukup mengejutkan aparat keamanan. Kenyataannya, deteksi intelijen tidak berhasil mencegah kapan dan dimana serangan yang telah direncanakan sejak Desember 2015, akan berlangsung. Serangan dibiayai oleh Bachrum Syah, tokoh ISIS/IS dari Indonesia di Suriah, dengan dana yang sudah disiapkan sebayak Rp. 1 milyar. Aksi terorisme pro-ISIS/IS oleh jaringan Indonesia tersebut dilancarkan oleh 5 orang pelaku, dengan sasaran ganda, orang asing di Starbuck, dan aparat kepolisian yang sedang berjaga di posnya. Korban serangan 7 orang tewas, termasuk 1 warga asing, sedangkan luka 24 orang, dengan 4 di antaranya warga asing.¹⁰ Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian, eks Komandan Densus 88 menyebut nama Bachrum Syah, alias Abu Ibrahim, alias Abu Muhammad al-Indonesi, yang telah bergabung dengan ISIS/IS Suriah pada tahun 2014, sebagai dalangnya, yang ingin mendirikan jejaring ISIS/IS Khatibah Nusantara gabungan para pengikut kelompok radikal Islam Indonesia dan Malaysia.¹¹ Semua pengikut dan kelompok, termasuk Abu Jandal, Santoso dan lain-lain akan bergabung semua di sini. Sementara, Sidney Jones, Direktur *The Institute for Policy and Analysis of Conflict* (IPAC) mengaitkannya dengan Jaringan Anshari Khilafah Indonesia (JAKI) yang dibentuk pada Nopember 2015.¹²

⁹ "Kapolri: Dua Jenazah Kelompok Santoso Belum Diserahkan ke Keluarga," *Mercusuar*, 31 Mei 2016: 1 & 15, *loc.cit.*

¹⁰ "The Face of Terror: Gunmen in Jakarta Rampage," *Majalah Tempo*, January 18-24, 2016, h. 14-31.

¹¹ Bachrum Syah sempat menjadi mahasiswa sampai semester 3 di UIN Jakarta. Lihat, Muhammad Haidar Assad. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira, 2014, h. 172-173.

¹² Wawancara dengan Sidney Jones, analis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta pada 4 April 2016.

Jika hingga akhir tahun 2015, target aksi-aksi teroris pro-ISIS/IS di Indonesia terbatas pada kelompok Shiah, tetapi sesudah itu meluas, mencakup warga minoritas lain dan warga asing. Dengan aksi terror 14 Januari 2016 itu, 3 orang Indonesia, yaitu Abu Jandal, Bachrum Syah, dan Bahrum Naim, alias Abu Rayyan, sedang bersaing untuk menunjukkan bahwa salah seorang dari mereka adalah yang terbesar dan lebih diakui sebagai pemimpin ISIS/IS dunia.¹³ Melalui aksi di Sarinah-Thamrin, mereka tengah berkompetisi memperlihatkan siapa yang lebih hebat, dari tokoh ISIS/IS dari Filipina Selatan, dari Kelompok Abu Sayyaf, yaitu Isnilon Totoni Hapilon.

Otak serangan terorisme ISIS/IS di Sarinah-Thamrin diduga Aman Abdurrahman, narapidana (napi) teroris yang masih ditahan di Nusakambangan,¹⁴ yang dekat dengan Abu Jandal alias Salim Mubarak At-Tamimi, tokoh Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, terutama Lamongan.¹⁵ Aman Aburrahman adalah ideolog gerakan teroris di Indonesia, yang dikenal dengan doktrin *takfiri*-nya untuk menjustifikasi aksi-aksi terorismenya, melalui ceramah-ceramahnya, bersama Abu Bakar Ba'asyir.¹⁶ Serangan direncanakan oleh JAKI, yang pengikutnya tersebar di daerah-daerah, yang dapat dikendalikan Aman Abdurrahman dari penjara Nusakambangan. JAKI dalam ideologi dan tindakannya sejalan dengan Khatibah Masyaariq di Suriah, yang dipimpin Abu Jandal. Serangan di Sarinah-Thamrin untuk menunjukkan respons para pengikut dan pendukung ISIS/IS terhadap operasi Camar Maleo dan Tinombala yang dilancarkan aparat keamanan kepada mereka, khususnya MIT dan Santoso, komandannya, di basis mereka di Poso.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ "Teroris Masih Targetkan Serangan," *Koran Jakarta*, 25 Januari 2016, h. 3.

¹⁵ Wawancara dengan Sidney Jones, analis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

¹⁶ Lihat, Rendi A. Witular, "The rise of Aman Abdurrahman, IS master ideologue," *The Jakarta Post*, January 25, 2016: 3; Lihat kembali, Assad, 2014, *op.cit.*

Pasca “konser Paris di Sarinah Jakarta”¹⁷ itu, Bahrum Syah, dari Suriah, diberitakan telah memerintahkan salah seorang pengikutnya untuk menjalankan aksi lain, namun berhasil digagalkan aparat keamanan dengan upaya *pre-emptive*-nya.¹⁸ Persaingan di antara para tokoh ISIS/IS, yakni Bahrum Syah alias Abu Ibrahim, Salim Mubarak alias Abu Jandal, dan Bahrum Naim, untuk mencari pengikut dan menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara, melalui aksi-aksi terorisme internasional mereka terhadap “musuh-musuh” ISIS, membuat Indonesia menjadi sangat rawan sebagai target.¹⁹ Dideklarasikannya secara berturut-turut Jemaah Ansharud Daulah (JAD) di bulan Maret 2015, lalu Ansharud Daulah Islamiyah (ADI) atau Katibah al-Iman pada Agustus 2015, dan kemudian Jamaah Ansharul Khilafah (JAK) pada Nopember 2015, selain memperlihatkan meningkatnya kompetisi di antara pengikut ISIS/IS, juga ancaman yang datang dari mereka.²⁰ Aksi-aksi terorisme ISIS/IS di Indonesia telah mengganggu dan merusak citra aparat keamanan di Indonesia, seperti yang dilakukan Kelompok Santoso di Poso.²¹ Kegagalan Polri, yang walaupun telah dibantu satuan-satuan khusus TNI dalam Operasi Tinombala, untuk menggulung Kelompok Santoso sejak September 2015, telah menciptakan reputasi buruk terhadap kapasitas aparat keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.²²

Aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS, yang diarahkan pada warga Indonesia, juga dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf, pimpinan Isnilon Totoni Hapilon, di Filipina Selatan, yang pada tahun 2014 telah bersumpah setia pada

pemimpin utama ISIS/IS di Suriah, Abu Bakar al-Baghdadi. Hanya dalam waktu 5 bulan, kelompok itu telah 3 kali melakukan pembajakan kapal dan menyandera Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia. Pertama, terhadap kapal tunda berbendera Indonesia, yaitu Brahma dan tongkang Anand 12, dengan tuntutan uang tebusan 50 juta Peso (Rp. 14,3 milyar).²³ Kedua, pada 15 April, terhadap 10 ABK warga Indonesia di kapal tunda berbendera Indonesia, yaitu Henry, dan tongkang Christy, yang juga meminta uang tebusan. Ketiga, pada 20 Juni 2016, terhadap kapal tunda berbendera Indonesia, yaitu Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, yang menyandera 7 ABK asal Indonesia dengan tuntutan uang tebusan sebesar Rp. 60 milyar.²⁴ Kemudian, ketika ke-7 ABK belum berhasil dibebaskan, kelompok itu melakukan kembali aksi pembajakan atas kapal berbendera Malaysia dan melakukan penculikan atas 3 ABK asal Indonesia, untuk meminta uang tebusan.

Dengan aksi pembajakan kapal dan penculikan, kelompok Abu Sayyaf dapat mendukung aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS dan separatisme mereka, sebagai bagian dari strategi ISIS/IS pusat mengeksekiskan kekhalifahan Timur Jauh (Asia) pada tahun 2016. Mengalirnya senjata ke Poso untuk dipakai Kelompok Santoso dalam kampanye ISIS/IS melawan aparat keamanan Indonesia sesungguhnya turut mendesripsikan koneksi yang erat antara Kelompok MIT dengan Kelompok Abu Sayyaf, atau Kelompok Anshorut Khilafah yang juga pro-ISIS/IS.²⁵ Santoso, pemimpin MIT, pernah mengikuti latihan jihad, *tadrib asyqari*, di

¹⁷ “The Face of Terror: Gunmen in Jakarta Rampage,” *Majalah Tempo*, January 18-24, 2016, *loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ “Perpecahan antara Warga Indonesia Pendukung ISIS dan Resiko Meningkatnya Kekerasan,” *Laporan IPAC No.25*, Jakarta, IPAC, 1 Februari 2016, h. 1.

²¹ Wawancara dengan Bupati Poso dan Danrem Tadulako di Poso pada 21 Juli 2016.

²² Pendapat Pansus RUU Anti-Terrorisme DPR dan tokoh masyarakat Poso yang menghadiri dengar pendapat (*hearing*) pada 21 Juli 2016 di rumah Bupati Poso.

²³ Rudy Polycarpus, “Presiden Minta Jaminan Keselamatan Sandera,” *Media Indonesia*, 1 April 2016, h. 1.

²⁴ “Penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh Abu Sayyaf,” *Kompas*, 12 Juli 2016, h. 1.

²⁵ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Densus 88 dengan pimpinan dan anggota Pansus RUU Amandemen UU Anti-Terrorisme No. 15/2003, di DPRRI, pada 15 Juni 2016; Juga, wawancara dengan Kopol Malsukri, dari Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) di Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016.

kawasan Filipina Selatan, melanjutkan latihan militer yang didapatnya dari Ali Fauzi, adik Muchlas, terpidana mati kasus Bom Bali, dan dari Faturrahman Al-Ghozi.

Hasil investigasi Densus 88 berhasil membongkar bahwa Kelompok Santoso telah memperoleh senjata ilegal, hasil pembelian dari Kelompok Abu Sayyaf, senilai Rp. 220 juta.²⁶ Untuk proses pembelian senjata ilegal ini, Santoso telah mengirim Iron, salah satu pengikutnya dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang sebelum ke Mindanao untuk mengambil kiriman senjata yang dikirim dalam 2 paket, berhasil ditangkap Polisi, di Manado, Sulawesi Utara, pada bulan Oktober 2014. Kiriman paket senjata pertama, senilai Rp. 130 juta, ke Poso, berupa beberapa pucuk senjata M-16, 4 magazine peluru M-16, 200 butir peluru amunisi M-16, 1 pucuk senjata sniper, 1 granat, 1 roket mini, dan 16 amunisi pistol FN-45. Sedangkan kiriman paket senjata kedua, senilai Rp90 juta, berupa 2 pucuk senjata M-16, 1 pucuk senjata sniper, serta 2 pucuk senjata Uzi dan amunisi.²⁷

Aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS telah direncanakan akan dilakukan pada bulan 17 Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 6-7 Juli 2016, namun dapat dicegah dan segera digulung pelakunya oleh Densus 88 pada 9 Juni 2016. Dalam kasus ini, 3 terduga teroris, bagian dari jejaring Abu Jandal, alias Salim Mubarak At-Tamimi, yang juga adalah tokoh ISIS/IS asal Indonesia di Suriah, yang dalam periode 2014-2015 membawa WNI asal Jawa Timur yang direkrutnya ke Suriah, berhasil ditangkap.²⁸ Mereka terlacak telah berkomunikasi dengan Bachrum Naim, tokoh ISIS/IS asal Indonesia, yang berada di Suriah.

Ketiga pengikut ISIS/IS dan pelaku aksi terorisme itu berencana melakukan apa yang mereka justifikasi sebagai aksi *amaliyah* di beberapa pusat keramaian di Jawa Timur, termasuk Surabaya. Mereka telah menyiapkan aksi terorisme menggunakan bom dengan detonator cahaya, selain menggunakan bom lain

yang memakai detonator dari telepon seluler, sehingga ketika telepon seluler dihubungi, bom langsung meledak.²⁹ Ketika diketemukan aparat kepolisian, ketiga bom dalam kondisi siap ledak. Bersamaan dengan ketiga bom itu telah pula ditemukan 2 pucuk senjata laras panjang, 1 pucuk senjata laras pendek, serta sebanyak 20 bom yang belum selesai dibuat, bahan kimia, dan juga kabel bom.³⁰ Para pelaku aksi-aksi terorisme di Jawa Timur itu telah menyiapkan *modus operandi* mengikuti skenario Bom Sarinah-Thamrin dengan target utama pos polisi di Jalan Mirarah, Galaxy, Surabaya. Untuk melakukan serangan di bulan Ramadhan itu, mereka telah berkomunikasi lewat video di media sosial, pada 21 Mei 2016, dengan Jubir ISIS/IS di Suriah, Syaikh Abu Muhammad Al-Agnani.³¹

Terakhir, aksi terorisme dilakukan dalam skala lebih kecil, dengan pelaku tunggal, Nur Rohman, yang menyatakan kesetiiaannya kepada ISIS/IS dan terlibat Bom Sarinah-Thamrin. Pada 5 Juli 2016, Nur Rohman, warga Solo, Jawa Tengah, termasuk dalam jaringan Arif Hidayatullah, alias Abu Mush'ab, telah tertangkap di Bekasi bersama pengikut ISIS/IS warga Uighur pada Desember 2015. Menurut kepolisian, Nur Rohman dikenal sebagai kelompok hisbah Solo, jaringan ISIS yang masih satu sel dengan Syamsudin Uba dari kelompok Bekasi. Saat melarikan diri pasca-Bom Sarinah-Thamrin dan gagal ditangkap di Jawa Timur, Nur Rohman telah membawa 3 bom aktif, yang salah satunya digunakan dalam serangan ke Mapolresta Solo.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kodrat Setiawan, "Tersangka Teroris Diduga Jaringan Bahrum Naim," *Koran Tempo*, 10 Juni 2016, h. 8.

³¹ Seruan ini juga telah dijalankan oleh pelaku individual di Orlando, AS, Omar Mateen, yang menyatakan dukungannya pada ISIS/IS sambil menjalankan aksinya menyerang klub malam *gay*, Pulse, pada 12 Juni 2016, dengan korban tewas 49 orang dan luka-luka 53 orang. Lihat, Tom Cleary, "Omar Mateen: 5 Fast Facts You Needs to Know," *Heavy.com*, June 14, 2016, diakses pada 7 Juli 2016.

³² Randy Ferdi Firdaus, "4 Fakta di Balik Sosok Nur Rohman, Bomber Mapolresta Solo," *Merdeka.com*, 6 Juli 2016, diakses pada 7 Juli 2016.

²⁶ Ruslan Sangaji, "MIT bought firearms from separatist group in Philippines," *The Jakarta Post*, April 6, 2016, h. 5.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat, "Teror Jelang Lebaran," *Kompas*, 10 Juni 2016, h. 4.

B. Perumusan Masalah

Dalam paruh pertama tahun 2016 ini telah terjadi beberapa aksi serangan terorisme ISIS/IS di Indonesia maupun yang dilakukan terhadap warga Indonesia dari wilayah perbatasan. Secara realistis, meningkatnya tingkat ancaman terorisme ISIS/IS di Indonesia dapat juga dilihat dari 35 polisi yang tewas dan 67 polisi lainnya yang luka-luka dalam perang melawan terorisme sejak 2004 hingga 2015. Dari 171 aksi terorisme yang terungkap selama 2000-2015, terdapat 1.064 terduga teroris yang telah ditangkap. Sementara, 408 WNI berada di Suriah telah bergabung dengan ISIS/IS, sedangkan di Indonesia, 543 orang teridentifikasi sebagai kelompok inti, 246 pendukung, dan 296 sebagai simpatisan.³³

Aksi-aksi terorisme ISIS/IS yang meningkat terjadi belakangan ini di Indonesia telah memunculkan dua pertanyaan pokok, yaitu, pertama adalah: mengapa aksi-aksi terorisme di atas mudah terjadi di Indonesia? Kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan ISIS/IS telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu medan, arena, atau sasaran terornya? Adapun penelitian ini menjawab kedua pertanyaan pokok tersebut.

C. Memahami Terorisme dan ISIS/IS

Begitu beragam definisi mengenai terorisme. Tetapi, dari definisi yang banyak itu, paling sedikit mempunyai 4 unsur utama yang selalu hadir, yakni penggunaan kekerasan yang maksimal dengan aksi destruksi yang hebat, sasaran tidak pandang bulu, mengandung unsur pemerasan, tekanan, dan pemaksaan, serta kebanyakan memiliki tujuan akhir politik-ideologis, sekalipun untuk kelompok yang sempit.³⁴ Terorisme dalam penelitian ini

merujuk pada aksi-aksi kekerasan yang brutal, tidak kenal batas, yang tidak selalu selektif memilih korbannya, siapapun dapat dibenarkan menjadi korbannya, termasuk kalangan sipil *non-combatant*, perempuan, orang tua, dan anak-anak, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan lain-lain, sehingga dapat menciptakan ketakutan yang hebat, dengan tujuan akhir pihak lain mengikuti keinginan si pelaku. Dengan definisi ini, pelakunya beragam latar belakang, lintas etnik, agama, dan ras, tetapi memiliki tujuan: pihak atau otoritas yang menjadi sasaran mengikuti kehendak si pelaku terorisme. Juga, karena korban yang menjadi sasaran tidak dipilih secara selektif, aksi ini selalu bisa dijustifikasi oleh pelakunya, jika sasaran lain menjadi korban, sekalipun masih kelompok dekatnya, atau yang masih memiliki kesamaan latar belakang.

Dalam *modus operandi*-nya, aksi-aksi terorisme bisa dilakukan berkelompok oleh orang-orang dengan kewarganegaraan lintas-negara, ataupun seorang diri saja (*lone wolf*). Yang jelas, aksi-aksi kekerasan yang brutal dengan korban yang maksimal selalu berusaha dicapai para pelakunya, dengan tujuan dapat meraih perhatian yang besar demi sukses kampanye radikalisme dan tujuan aksi-aksi terorisme yang dilakukan pelakunya.³⁵ Sementara, terminologi internasional mendeskripsikan bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan, sasaran, termasuk pula pengikut, pendukung dan simpatisannya, serta tujuan pelakunya tidak mengenal batas atau entitas negara. Kalaupun entitas negara masih digunakan, itu dalam makna, yang tidak lagi sempit, tetapi dalam perspektif sejagad (*mondial*, seperti ISIS/IS dengan konsep kekhalifahannya).³⁶

Dengan konteks definisi di atas, pelaku aksi-aksi terorisme terdiri dari pelaku revolusi sosial, baik yang berwawasan nasional maupun internasional, kelompok pemberontak separatistis, dan kelompok fundamentalis agama, beraliran kiri maupun kanan, ataupun etno-nasional,

³³ "Prioritas Cegah Terorisme," *Kompas*, 30 Desember 2015, h. 5.

³⁴ Lihat, Louis Jacobson, "What's the definition of 'terrorism'?" *Politifact*, July 9th. 2013, <http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/jul/09/whats-definition-terrorism/>, diakses pada 29 September 2016; John Harrison, "The Future of Terrorism," in Daljit Singh (ed), *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*, New Delhi: Macmillan Publishers India, 2009, h. 47-61.

³⁵ Lihat Heru Susetyo, "Revisi UU Terorisme," makalah RDP dengan Pansus RUU Terorisme DPRRI pada 8 Juni 2016, h. 3-9.

³⁶ Assad, 2014, *op. cit.*

tribalis, dan sejenisnya.³⁷ ISIS/IS, dengan aksi-aksi terorisme internasional yang dilakukannya selama ini, telah dikategorikan sebagai salah satu kelompok teroris internasional. Dengan nama dan identitas lain yang melekat dengan organisasinya, seperti bendera, latar belakang para pelakunya, dan terutama tujuan akhir yang hendak diwujudkan, ISIS/IS telah dikategorikan sebagai kelompok fundamentalis agama yang hendak memperjuangkan berdirinya kekhalifahan Islam sejagad dengan cara dan menargetkan sasaran apapun sebagaimana yang dijustifikasi oleh para pelaku terorisme. Oleh karena itu, para pengikut, pendukung, dan simpatisannya memang layak disebut sebagai bagian dari sebuah organisasi teroris internasional.

Melihat sejarahnya, ISIS/IS berawal dari *Islamic State in Iraq* (ISI) yang didirikan pada 13 Oktober 2006 oleh Majelis Syura Mujahidin, yang telah menobatkan Abu Umar Bakar al-Baghdadi sebagai Khalifah pertamanya. Ia adalah tokoh yang diciptakan Al-Qaeda untuk Irak, yang juga mantan perwira dinas keamanan Irak yang telah dipecat karena ekstrimismenya, dan bergabung dengan Al-Qaeda Irak pimpinan Zarkawi sejak tahun 1985.³⁸

ISIS sendiri merujuk pada gerakan untuk mendirikan komunitas kekuasaan di bawah kekhalifahan Islam, yang semula menargetkan wilayah Iraq dan Suriah, sehingga disebut juga ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant*), yang dalam bahasa Arab akronimnya disebut sebagai *Daesh*. ISIS kemudian berkembang dengan sasaran lintas-negara, yang para pengikutnya mengklaim sebagai kelompok militan salafi-jihadism yang fundamentalis,³⁹ pengikut Wahabi, bagian dari Islam-Sunni.⁴⁰ Untuk cita-cita yang lebih tinggi dan ideal, demi mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat

Islam sedunia, ISIS lalu menyebut juga dirinya sebagai IS, *Islamic State*, sehingga aktivitas gerakan dan perjuangannya tidak lagi terbatas di Irak dan Suriah. Sementara itu, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maraknya radikalasi ideologi gerakan ISIS/IS, serta kekosongan dan melemahnya penegakan hukum dalam berbagai penelitian dan temuan atas kasus-kasus yang terjadi telah menjadi penyebab, sehingga membuat ancaman ISIS/IS di Indonesia menjadi sangat berbahaya dan rawan kondisinya dewasa ini dan di masa mendatang.⁴¹ Dengan kata lain, terorisme sangat berbahaya dan rentan mengganggu keamanan dan stabilitas nasional, serta mengancam kedaulatan dan eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagai sebuah entitas negara dan cita-cita warga bangsa yang sangat majemuk kondisinya.

Mengenai kaitan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan terorisme, dijelaskan, antara lain oleh Sukawarsini Djelantik, sebagai bukan alasan yang bersifat absolut, atau tidak otomatis dan selamanya menghasilkan aksi-aksi terorisme, apalagi secara langsung dan yang berskala internasional, mengingat, dalam kelompok tertentu, kemiskinan dan kesenjangan sosial bisa diselesaikan dengan mekanisme tersendiri yang nirkekerasan, yakni eskapisme sosial.⁴² Namun, tidak dapat dipungkiri, kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan refleksi dari ketidakadilan sosial, jika terus dibiarkan oleh sistem yang berlaku dan rejim yang berkuasa. Itulah sebabnya, kemiskinan dan kesenjangan sosial akan melahirkan marjinalisasi massa yang berimplikasi pada munculnya aksi-aksi kekerasan, termasuk yang mengarah kepada terorisme internasional, karena di dalamnya muncul keputusan dan frustrasi.

Semakin meluas dan tingginya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial, semakin besar pula peluang dan dahsyat terjadinya aksi-aksi terorisme internasional. Sambil mengutip pendapat internasional, Djelantik mengingatkan, kemiskinan sebagai ancaman

³⁷ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor, 2010, h. 24.

³⁸ *Ibid*, h. 97 et seq.

³⁹ Lihat, Shiraz Maher, *Salafi-Jihadism: The History of an Idea*, Oxford, 2016.

⁴⁰ Muhammad Haidar Assad *ISIS: Organisasi Teroris Paling Menyeramkan Abad Ini*. Jakarta: Zahira, 2014, h. 244.

⁴¹ Djelantik, 2010, *op.cit*,

⁴² *Ibid*, h. 270.

terbesar bagi perdamaian dan keamanan. Kemudian, jika ia bercampur atau terjadi dalam sebuah sistem politik yang penuh dengan korupsi dan represi, akan menjadi sebuah penyebab yang amat buruk atau mematikan di dalam masyarakat/negara, karena sangat rentan, antara lain, oleh pengaruh terorisme.⁴³ Sebagai konsekuensinya, pengentasan kemiskinan dengan kebijakan yang efektif dalam membrantas pengangguran dan pemberdayaan masyarakat merupakan solusinya, sambil menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan adil, yang mampu menciptakan kesejahteraan dan mengeliminasi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan ini, adopsi demokrasi dan penegakan hukum yang konsisten akan memberikan akses yang sama bagi warga masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan sosial.⁴⁴

Meningkatnya ancaman terorisme pro-ISIS/IS di Indonesia juga disebabkan oleh suksesnya propaganda para pembuat ideologi gerakan dan pelaku di lapangan. Propaganda ini dilakukan melalui radikalisasi pemikiran, yang berlandaskan pada penafsiran Islam yang berbeda, karena telah bercampur dengan ideologi politik yang ekstrim dan pro-kekerasan, yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan, termasuk memerangi umat Islam sendiri, serta perempuan dan anak-anak yang boleh dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme internasional. Kegiatan radikalisasi adalah mesin penggerak atau penentu mati-hidupnya atau mandek-tidaknya pertumbuhan pengikut gerakan terorisme internasional ISIS/IS.⁴⁵ Kegiatan ini didukung oleh kehadiran guru agama, ulama, pemberi inspirasi, dan ideolog yang kukuh dalam pendirian atau keyakinannya. Karena itulah, radikalisasi ajaran Islam amat dikuatirkan oleh aparat keamanan yang

memerangi ISIS/IS, dan sebaliknya, aktivitas deradikalisasi menjadi sangat penting, sehingga sukses memerangi ISIS/IS akan tergantung pada sukses deradikalisasi para tokoh dan pengikutnya.⁴⁶

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang kegiatan *field researches* dan pengumpulan datanya dilakukan di Jakarta, Palu, Poso, dan Aceh. Pemilihan wilayah penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa wilayah-wilayah itu adalah basis aktivitas atau telah menjadi sasaran serangan ISIS/IS. Ke dan dari wilayah-wilayah ini, para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS telah menjalankan aksi-aksi terorisme mereka. Operasi dan kampanye anti-terorisme pro-ISIS/IS pun dilakukan di wilayah-wilayah tersebut. Selama ini, wilayah-wilayah itu sebelumnya telah menjadi basis persembunyian, perekrutan, dan pelatihan para pemimpin dan pengikut kelompok radikal keagamaan. Terlebih lagi, aksi bersenjata para pelaku terorisme pro-ISIS/IS masih dilakukan di sana.

Data dikumpulkan melalui penggabungan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, melalui serangkaian pengamatan dan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara sengaja. Adapun informan adalah aparat keamanan, dari pihak kepolisian dan TNI, serta aparat sipil Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), yang tugasnya terkait dengan ancaman di bidang politik dan keamanan di daerah. Dengan aparat kepolisian, wawancara dilakukan dengan pihak Polda Sulawesi Tengah, Polres Poso, dan Polda Aceh, sedangkan dengan aparat TNI, wawancara dilakukan dengan Korem Palu, Kodim Poso, dan Kodam 1/Iskandar Muda, Aceh. Selain itu, wawancara secara mendalam juga dilakukan dengan pengamat terorisme internasional domestik dan asal mancanegara.

Data yang terkumpul diperiksa kembali akurasinya dan diseleksi relevansinya, untuk

⁴³ *Ibid*, h. 255.

⁴⁴ Rizal Sukma, "Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12," Kumar Ramakrishna and See Seng Tan (eds.), *After Bali The Threat of Terrorism*, World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2003, *ibid*, h. 269.

⁴⁵ Lihat, Agus SB. *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014.

⁴⁶ Lihat pula, Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: YPKIK, 2009.

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Maret-Agustus 2016.

II. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

A. Perekrutan ISIS/IS di Indonesia

Hingga sekarang ini konflik sosial yang melibatkan etnis Tionghoa masih saja sering terjadi. Hal ini berdampak terhadap jalinan komunikasi yang kurang baik antar sesama anak bangsa. Diskriminasi yang dihadapi minoritas Tionghoa ini merupakan warisan dari kebijakan etnis yang dulu dilakukan pemerintah Hindia Belanda selama berkuasa.

Sekolah-sekolah tradisional Islam (pesantren) yang jauh dari kontak, kerja sama, pengawasan, atau pembinaan institusi pendidikan pemerintah amat rawan sebagai basis pendidikan Islam yang konservatif, tertutup, sektarian, radikal, dan pro-kekerasan, yang menjadi sumber perekrutan atau penyedia pengikut atau aktivis militan Islam dalam berbagai bentuk organisasi pendukung dan pelaksana aksi-aksi terorisme di dalam dan luar negeri, termasuk ISIS/IS. Seperti dalam organisasi Jamaah Islamiyah, dalam ISIS/IS pun ditemukan, para pengikut yang merupakan alumni pesantren seperti Al-Mukmin Ngruki dan Darusyadah atau Al-Amanah Boyolali di Provinsi Jawa Tengah, dan Al-Islam di Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tokoh seperti Santoso yang menjadi pemimpin MIT, paling sedikit pernah berinteraksi dengan ulama asal sekolah-sekolah tradisional Islam semacam itu, seperti Siswanto dan Zaenal Arifin, yang telah menyerang Markas Polisi di Poso.⁴⁷ Ketua BNPT, Saud Usman Nasution, mengungkapkan terdapat 19 pondok pesantren (ponpes) yang pengajaran atau kegiatannya mengarah ke radikalisme.⁴⁸ Namun, di luar itu, para pelaku aksi-aksi terorisme di Indonesia yang pro-JI, Al-Qaeda atau ISIS/IS juga ada yang pernah

mengecap pendidikan di lembaga pendidikan modern Islam, seperti UIN⁴⁹ dan LIPIA, yang menerima dana hibah pendidikan dari Arab Saudi, yang berlatar belakang Wahabi. Hubungan yang tercipta dan interaksi sosial dalam media sosial membuat mereka kemudian terkoneksi dalam jaringan organisasi seperti Al-Qaeda, JI, dan ISIS/IS.

Upaya mencari pengikut baru dalam ISIS/IS tidak banyak berbeda dengan yang dilakukan dalam Al-Qaeda dan JI, dengan sasaran ke berbagai lapisan dan kelas sosial masyarakat. Sasaran yang amat rapuh dan mudah dipengaruhi adalah dari kalangan yang tidak terdidik dan memiliki latar belakang ekonomi yang buruk, hidup dalam kondisi miskin dan tanpa pekerjaan (tetap). Terhadap lapisan masyarakat dari kalangan ini, perekrutan dilakukan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidup sehari-hari. Selanjutnya, ditawarkan kegiatan ibadah umroh gratis dengan lanjutan kegiatan wisata ke kota-kota suci Islam di sekitarnya melalui agen perjalanan. Iming-iming gaji dan pemenuhan kebutuhan pokok lain secara teratur, yang disampaikan kepada calon yang akan direkrut.⁵⁰ Untuk kalangan bawah yang tanpa pekerjaan ataupun dengan pekerjaan tidak tetap dan penghasilan sangat kecil, gaji sebesar US\$ 300-400 memberi daya tarik yang besar.⁵¹ Kasus bergabungnya Ahmad Junaedi alias Abu Salman, pedagang bakso yang sempat bergabung dengan ISIS/IS di Suriah, adalah salah satu contohnya.⁵²

Upaya perekrutan ke dalam, dengan mencari pengikut dari kalangan keluarga dan teman-teman satu pekerjaan, tetangga dekat, dan pengajian, adalah salah satu bentuk *modus* perekrutan yang sederhana. Keterlibatan Umar Jundulhaq, yang tewas dalam pertempuran di

⁴⁷ Lihat, Noor Huda Ismail, "The intricate social network behind Santoso and his group," *The Jakarta Post*, April 8, 2016, h. 6.

⁴⁸ BNPT Sebut 10 Pondok Pesantren Mengarah ke Radikalisme," *Koran Tempo*, 23 Februari 2016, h. 6.

⁴⁹ Lihat, Muhammad Haidar Assad. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira, 2014.

⁵⁰ "Jaringan ISIS Tanah Jawa," *Majalah Gatra*, 26 Maret-1 April 2015, h. 19.

⁵¹ Dwi Arjanto, "ISIS Terpojok Seiring dengan Menyusutnya Area," *Koran Tempo*, 7 Desember 2015, h. 25.

⁵² "Ekonomi Turut Picu Radikalisme," *Kompas*, 24 Nopember 2015.

Suriah, pada Oktober 2015, telah membuka identitasnya sebagai putera Imam Samudera, yang telah dihukum mati karena kasus terorisme (Bom Bali II).⁵³ Dalam beberapa temuan, kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), pimpinan Santoso yang sangat dicari-cari pihak kepolisian, telah merekrut kaum perempuan untuk menjadi pengikut ISIS/IS. Mereka berasal dari isteri-isteri para aktivis radikal dan pelaku aksi-aksi terorisme di Indonesia yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut ISIS/IS. Dari sebanyak 32 anggota MIT pimpinan Santoso di Poso, yang telah bergabung dengan ISIS/IS, diketahui 3 orang perempuan isteri pimpinan MIT --Santoso, Basri, dan Ali Kalora.⁵⁴

Wilayah-wilayah di Indonesia dengan latar belakang kemiskinan dan budaya yang keras, serta terisolasi, karena kondisi geografisnya yang memiliki pegunungan dan hutan lebat, sangat rawan terhadap perekrutan. Palu,⁵⁵ Poso,⁵⁶ dan Bima, serta wilayah-wilayah di Aceh⁵⁷ menjadi

pilihan para tokoh teroris, karena penduduknya memiliki ideologi atau konservatisme agama yang sama.⁵⁸ Di wilayah-wilayah itu mudah mencari simpatisan, pendukung, dan pengikut baru. Apalagi, di masa lalu, di sana pernah terjadi konflik sektarian, yang di antara tokoh terorisnya, pernah terlibat atau memimpin dan membela kelompoknya.⁵⁹ Tidaklah mengherankan, wilayah-wilayah tersebut telah menjadi sasaran para inspirator, tokoh atau aktor utama gerakan terorisme pro-ISIS/IS, walaupun sempat berangsur-angsur aman kembali dari aksi-aksi kekerasan. Akibat datangnya para pelaku terorisme lama asal Jawa untuk menanamkan pengaruh mereka, wilayah-wilayah itu menjelma kembali sebagai tempat kegiatan dan sekaligus persembunyian yang ideal bagi para pengikut atau aktivis ISIS/IS, termasuk yang datang dari mancanegara (Asia Tengah, Malaysia, Pakistan dan lain-lain, terutama Timur-Tengah).⁶⁰ Sementara, Jawa Barat, Tangerang, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang selama ini menjadi sumber perekrutan atau pensuplai para pengikut baru ISIS/IS yang berangkat berjihad ke Suriah. Kemudian, kantong-kantong kemiskinan di berbagai kota dan kabupaten seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Ciamis, Bandung, Solo, Yogyakarta, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Lamongan, Makasar, dan Poso⁶¹ menjadi pusat kegiatan dan penyuplai gerakan.⁶²

Untuk calon pengikut dari lapisan menengah ke atas, perekrutan dilakukan dengan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sangadji, Ruslan. "IS-linked MIT recruits female fighters," *The Jakarta Post*, January 5, 2016, h. 1.

⁵⁵ Wawancara dengan Kopol Malsukri, dari Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) di Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016; dan wawancara dengan Kopol Sapruddin, Kepala Subbag Penmin, yang pernah bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016.

⁵⁶ Wawancara dengan Danrem Tadulako dan Kabinda Poso pada 21 Juli di Rumah Bupati Poso.

⁵⁷ Dalam wawancara dengan aparat Kesbangpol-Linmas Kota Banda Aceh dan juga dengan Kepala Kesbangpol-Linmas Provinsi NAD, Dedy Andrian, di Kota Banda Aceh, pada 8 Agustus 2016 dikatakan bahwa sikap konservatif masyarakat Aceh dalam menerapkan Syariat Islam, yang diidentifikasi sebagai intoleran terhadap agama lain, dan sebaliknya, radikal terhadap agama sendiri, tidak berarti bahwa mereka dapat begitu saja menerima kehadiran ISIS/IS dan aksi-aksi terorismenya, seperti yang telah dikampanyekan Abu Bakar Ba'asyir. Sebagai indikasinya, walaupun tidak sepenuhnya tepat, adalah gagalnya Ba'asyir mencari pengikut gerakan pro-ISIS/IS dari Aceh. Sedangkan Alif, pelaku Bom Sarinah asal Aceh, semula adalah narapidana (napi) kriminal, yang direkrut Ba'asyir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, dan bukan produk radikalisasi di Aceh.

⁵⁸ Lihat pula, "BNPT: Indonesia Butuh Lapas *Maximum Security*," *Suara Pembaruan*, *Suara Pembaruan*, 14 April 2016, h. 4.

⁵⁹ Lihat, "Satgas Selidiki Propaganda Santoso," *Kompas*, 15 April 2016, h. 4.

⁶⁰ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Densus 88 dengan pimpinan dan anggota Pansus RUU Amandemen UU Anti-Terrorisme No. 15/2003, di DPRRI, pada 15 Juni 2016.

⁶¹ Dalam wawancara dengan Danrem Tadulako dan Kabinda Poso pada 21 Juli 2016 di Rumah Bupati Poso, terungkap, Poso diharapkan Santoso dkk dapat menjadi basis perjuangan Syariat Islam yang ideal di tanah air.

⁶² "Jaringan ISIS Tanah Jawa," *Majalah Gatra*, 26 Maret-1 April 2015, h. 12-15.

modus pendekatan secara pribadi dan melalui kelompok-kelompok sosial, terutama pengajian, dan propaganda media sosial, misalnya lewat situs *Al-Mustaqbal.net* dan *Arrahmah.com*, demi memenuhi panggilan *jihad* sebagai *fardhu a'in*, untuk hidup di bawah naungan *khilafah*.⁶³ Propaganda *Daulah Khilafah, nubuwwah* yang disiarkan melalui media sosial, secara realistis, dapat menarik pengikut ISIS/IS dari kalangan menengah ke atas, termasuk kaum intelektual, dengan pekerjaan yang sudah mapan. Data intelijen mengungkap, paling sedikit terdapat 11 situs radikal, media propaganda kelompok teroris pro-ISIS/IS, yang telah diblokir.⁶⁴

Dari investigasi selama ini diperoleh informasi, para pengikut ISIS/IS tinggal di rumah-rumah kontrakan, antara lain, dalam kasus di Kota Mojokerto, yang difungsikan sebagai tempat pengobatan tradisional. Ada juga terduga teroris, dalam kasus di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai peracik jamu herbal.⁶⁵ Terdapat juga yang berlatar belakang pegawai negeri, seperti Muhammad Agus Supriadi alias Abu Hamzah. Sebelum bergabung dengan ISIS, Abu Hamzah adalah pegawai negeri sipil, yang kemudian menjadi pemimpin kelompok pengajian Firqoh Abu Hamzah (FAH) di Depok.⁶⁶

Kombinasi kemampuan ekonomi dan idealisme mencari *nubuwwah* memberi daya tarik yang besar bagi mereka. Ini termasuk bagi mereka yang hidup rasional dengan ekonomi pekerjaan dan kehidupan ekonomi mapan di negara maju, untuk mau bergabung mewujudkan *Daulah Khilafah*, menjadi *jihadists* di Suriah dan, belakangan, di negaranya masing-masing, mengikuti perubahan strategi perjuangan pemimpin ISIS/IS di Suriah. Kaum migran dan imigran yang sukses di negara maju seperti AS, Inggris, Australia dan lain-lain adalah kelompok

yang juga menjadi sasaran dan terpengaruh proganda perjuangan ISIS/IS. Propaganda media sosial diketahui menghasilkan pengikut baru ISIS/IS yang *self-radicalized*,⁶⁷ yang dapat melakukan aksinya sendiri-sendiri dan secara spontan di negara-negara Barat, belakangan ini, yang tidak kalah berbahaya.

Kemajuan yang pesat (teknologi) dunia maya menawarkan banyak kemudahan, tidak terkecuali bagi kelompok radikal seperti ISIS/IS dalam proses perekrutan para pengikut, pendukung dan simpatisan gerakan, serta aksi-aksi terorisme mereka. Tentang peran media sosial dalam proses perekrutan pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS, penilaian Deputy Kerja Sama Internasional BNPT, Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose, perlu mendapat perhatian. Secara gamblang, ia telah menyatakan, kelompok teroris ISIS/IS telah menggunakan internet untuk berbagai aktivitas mulai dari propaganda, perekrutan, penyediaan logistik, pelatihan, pembentukan para militer, perencanaan, pelaksanaan serangan teror, persembunyian sampai pendanaan.⁶⁸ Fasilitas *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, laman blog dalam internet, sampai *WhatsApp* dalam telepon genggam dan bahkan telegram, menjadi pilihan yang efektif kelompok radikal dan aksi teroris ISIS/IS dalam menebar dan menancapkan pengaruh mereka di benak para pengguna internet, terutama kaum muda.

Lebih spesifik lagi, *Youtube* dengan fasilitas sederhana untuk mengunggah video menjadi preferensi ISIS/IS dalam menyebarkan propaganda mengenai (rencana) ancaman serangan dan pesan aksi terorisme bagi para pengikut dan pelakunya. Sedangkan *Facebook* dan *Twitter* merupakan sarana terbaik untuk menjaring atau merekrut para pengikut, pendukung, dan simpatisan mereka. Informasi mengenai aksi terorisme baru disebarakan lewat terutama *Facebook*, dengan menggunakan taktik 'jihad swafoto' (*selfie*).⁶⁹ Cara ini efektif

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ "11 Situs Radikal, Diblokir," *Republika*, 16 Januari 2016, h. 3.

⁶⁵ "Densus Tangkap 4 Terduga Teroris," *Suara Karya*, 21 Desember 2015, h. 6.

⁶⁶ "Perpecahan antara Warga Indonesia Pendukung ISIS dan Resiko Meningkatnya Kekerasan," *Laporan IPAC No.25*, Jakarta, IPAC, 1 Februari 2016, h. 3-4.

⁶⁷ Lihat, "Jaringan ISIS Tanah Jawa," *Majalah Gatra*, 26 Maret-1 April 2015, *loc.cit.*, h. 23.

⁶⁸ Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace, ibid*; juga, Petrus Reinhard Golose. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: YPKIK, 2009.

⁶⁹ Mahar, *loc.cit.*

sekali memprovokasi kaum muda untuk bergabung dengan ISIS/IS, mengikuti aksi-aksi terorisme yang tengah mereka lancarkan. Di sini pemimpin ISIS/IS mewajibkan para pelaku terorisme segera membuat *selfie*, dengan pakaian gamis *ala* mujahid, mengenakan sorban, sambil menenteng senjata serbu Kalashnikov (AK-47), selesai menjalankan tugas mereka, walaupun belum tentu terkait langsung dengan peperangan.

Karakter lain dari aktivitas pengikut ISIS/IS, setelah menjalankan aksi, mereka segera memberitakannya ke seluruh dunia melalui media sosial *Facebook* dan *Twitter*, sebagai alat propaganda untuk meraih simpati dan dukungan atas apa yang baru saja mereka lakukan di lapangan, dan mencari pengikut baru. Mereka melakukannya dengan akun anonim, dalam rangka mengklaim aksi-aksi terorisme mereka. Baik dalam aksi serangan bersenjata secara membabi-butu di Paris maupun serangan bom di Aden, Yaman, pengikut dan pelaku serangan dari ISIS/IS segera mengumumkannya melalui status mereka yang disampaikan lewat akun anonim di *Facebook* dan *Twitter*.

Bahkan, telah terlacak, awal mula pembentukan dan deklarasi ISIS/IS telah disampaikan melalui *Twitter*, pada bulan Oktober 2013, dengan memakai akun *I'tisamm@a3tasimo*, yang nama akun tersebut bermakna mempertahankan tradisi Islam tanpa penyimpangan.⁷⁰ Di luar klaim, para pengikut ISIS/IS telah memakai *Twitter* untuk memberitakan secara langsung aktivitas mereka dengan kicauan terbaru mereka. Akun-akun anonim baru diciptakan dengan memanfaatkan lebih banyak dan beragam lagi fasilitas *Twitter* untuk menyebarkan berbagai propaganda baru.

Seperti dilihat Al-Chaidar, yang pernah terlibat gerakan radikal di masa Orde Baru dan kini menjadi pengamat terorisme, Media *WhatsApp* dan telegram telah menambah *variant* dalam modus baru pengikut ISIS/IS mengkomunikasikan akitifitas dan interaksi mereka.⁷¹ Cara ini untuk

mengurangi interaksi langsung para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS di lapangan, yang rawan terdeteksi atau penyergapan. Dengan kata lain, interaksi tanpa batas jarak dan waktu melalui fasilitas komunikasi dan percakapan yang eksklusif di media sosial, dalam banyak hal menggantikan secara efisien interaksi mereka lewat kegiatan pengajian dan pertemuan rutin.

Dengan berbagai fasilitas media sosial, lebih banyak pengikut, pendukung, dan simpatisan, yang masih bertaraf pasif, dapat dengan mudah direkrut. Mereka bisa bergabung untuk berdiskusi aktif atau sekadar mengikuti kabar dan wacana yang berkembang saja. Dengan demikian, kampanye, tepatnya propaganda, radikalisme ISIS/IS dapat secara mudah didiseminasikan para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS ke seluruh dunia, dalam waktu singkat dan secara simultan. Fasilitas internet juga dapat dimanfaatkan dan dinikmati mereka secara murah dan efektif untuk mengontrol kegiatan dan aksi-aksi terorisme mereka di lapangan, tanpa mudah dilacak. Secara realistis, *modus operandi* ISIS/IS ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan yang telah digunakan Al-Qaeda pada dasawarsa 1980, yang masih terbatas bisa disaksikan karena baru dapat dikirim melalui kurir biasa atau ke jaringan televisi.⁷²

Kegiatan *jihād* (*amaliyah*) ISIS/IS dapat dilakukan secara langsung dengan ber-*jihād* ke Irak dan Suriah, negeri tempat bermula dan dideklarasikannya ISIS/IS. Aktivitas *jihād* untuk ISIS/IS dapat pula dijalankan di negara-negara tetangga di Timur-Tengah dan Afrika Utara, atau di luar kawasan itu. Untuk kawasan kekhilifahan atau provinsi jauh ini, kegiatan *jihād* dapat dijalankan di negara asal para pejihad, yakni di Indonesia yang luas, yang merupakan surga dan tanah yang subur tempat berkembangnya ideologi dan aktivitas gerakan mereka. Untuk ke Irak dan Suriah, dari berbagai wilayah di Indonesia, tersedia banyak akses keluar untuk berjihad ke sana, baik melalui berbagai jalan tikus maupun akses resmi bandara internasional. Perjalanan berjihad

⁷⁰ Jessica Stern and JM Berger, *The State of Terror*, dalam Mahar, *ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Stern and Berger, *ibid.*

berlanjut melalui wilayah dan pelabuhan serta bandara transit di Kuala Lumpur (Malaysia), Singapura, dan Hong Kong menuju Abu Dhabi (Dubai), Jeddah, dan Turki, untuk selanjutnya menuju negara tujuan akhir Suriah dan Irak.⁷³

Sampai saat ini, walaupun tengah menghadapi tekanan aparat keamanan akibat Operasi Tinombala yang diperpanjang, Kelompok Santoso masih aktif melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan menggunakan jejaring lain yang berhubungan dengan Kelompok MIT.⁷⁴ Karena itu, tercatat ada 3 orang yang diduga ingin bergabung, namun kemudian berhasil ditangkap di Poso dan Palu. Mereka diduga napi terorisme yang dipenjara di sejumlah lapas di Jawa.⁷⁵

Munculnya pengikut baru dapat berlangsung karena gagalnya upaya deradikalisasi, yang justru berubah menjadi radikalisasi. Deradikalisasi gagal, karena kuatnya pengajaran dan indoktrinasi yang telah dilancarkan oleh ISIS/IS dan aliran Wahabi/Salafi.⁷⁶ Sementara, walaupun tokoh atau pelaku aksi terorisme telah tewas, eksistensi keluarga yang menjadi korban, serta dukungan dan simpati yang datang dari para pendukung dan simpatisan lokal dan internasional membuat ancaman terorisme selama ini sulit dipadamkan, dan memiliki potensi berlanjut di kemudian hari. Demikian pula, jika keberadaan jejaring mereka belum tereliminasi. Hal ini diakui oleh kalangan TNI, yang juga memiliki tugas dalam penanggulangan terorisme dalam rangka Operasi Militer Selain Perang.⁷⁷ Penyebaran paham

radikal ISIS/IS secara langsung melalui tokoh-tokoh yang ditahan di penjara telah pula terjadi, dan akibat dari interaksi penduduk lokal dengan orang luar, atau sebaliknya, dengan orang luar datang setelah terpengaruh propaganda lewat media sosial dan proses radikalisasi guru-guru agama yang mengajarkan paham Wahabi/Salafi. Alasan inilah yang menjelaskan mengapa mantan napi kriminal dan napi terorisme bergabung dan kembali ke hutan bersama Santoso menjalankan aksi-aksi mereka.⁷⁸

Hubungan antar-pesantren lokal, seperti Amanah, dan di Malino, serta beberapa lainnya, dengan pesantren di Solo dan Bima, dan orang yang keluar-masuk Poso yang semakin mudah mengingat perjalanan ke Timur-Tengah sudah terbuka dan mudah,⁷⁹ memunculkan hadirnya pelaku, pengikut, pendukung, dan simpatisan aksi-aksi terorisme baru melawan aparat negara. Perkembangan ini melahirkan para pelaku dan pengikut terorisme pro-ISIS/IS yang lebih radikal melawan aparat negara, dengan kampanye/propaganda *thogut*⁸⁰ mereka yang efektif dan keras terhadap aparat negara, terutama kepolisian. Sisa-sisa dendam masa lalu atas tindakan aparat negara dalam mengatasi konflik sektarian yang terjadi di awal hingga pertengahan dasawarsa 2010, akibat banyak di antara mereka yang menjadi korban,⁸¹ dan sebaliknya, ancaman yang sadis

⁷³ Lihat "Jalur Rekrutmen Anggota ISIS," *Majalah Tempo*, 30 Maret-5 April 2015, *loc. Cit.*, h. 41.

⁷⁴ Wawancara dengan Danrem Tadulako dan Kabinda Poso pada 21 Juli 2016 di Rumah Bupati Poso.

⁷⁵ "Santoso Masih Rekrut Anggota dengan Memakai Jaringan Lain," *Kompas*, 7 Mei 2016, h. 4.

⁷⁶ Wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) di Polres Poso dan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan Kompol Sapruddin, Kepala Sub-bag Penmin, yang pernah bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) Polres Poso dan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016; juga, wawancara dengan Kompol Malsukri, Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016.

⁷⁷ Wawancara dengan Letkol (Inf) Adrian Susanto, Kepala Staf Korem 132/Tadulako, Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 25 Mei 2016.

⁷⁸ Wawancara dengan Kompol Fadly, Kepala Koordinasi Sekretaris Pimpinan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016. Juga, wawancara dengan Kompol Malsukri, dari Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016.

⁷⁹ Sekarang sudah ada maskapai penerbangan, seperti Garuda, yang menggarap perjalanan umroh dan haji Palu-Jeddah via Jakarta dengan harga menarik, seperti diiklankan dalam koran lokal, *Radar Sulteng*, 24 Mei 2016.

⁸⁰ Mereka, terutama aparat negara dan pemimpin, yang dipersepsikan tidak mendukung, berpihak, atau terpenggil untuk menegakkan ajaran Islam secara konsisten. Lihat, Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES, 2014, h. 45, 96.

⁸¹ Dalam wawancara dengan Hanny V. Tandaju, S.Sos, MM, Sekretaris Kesbangpol, Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 25 Mei 2016, dan dengan Syahwir, Kepala Sub

dari pengikut Kelompok Santoso kepada masyarakat lokal yang mau bekerja sama dan bersikap baik kepada aparat negara, terutama kepolisian, telah mengungkapkan mengapa Poso menjadi salah satu pilihan *safe haven* bagi Santoso dan tokoh-tokoh ISIS/IS Indonesia.⁸² Santoso, terungkap diberitakan berupaya membeli senjata dari Filipina Selatan.⁸³ Bahkan, lebih jauh lagi, ia diberitakan telah berencana membeli kapal untuk mendukung operasi dan aksi-aksinya, untuk menghindari dari sergapan aparat.⁸⁴ Ini artinya, selama ini, sebelum ditembak mati oleh aparat keamanan dalam Operasi Tinombala di Gunung Biru Poso, Santoso percaya diri dapat membiayai segala aktivitas terorismenya melawan aparat Indonesia dengan dana-dana asal mancanegara. Untuk merespons perkembangan keadaan ini, TNI yang mempunyai tugas Operasi Militer Selain Perang, dalam rangka membantu aparat kepolisian (Polri) perlu melancarkan apa yang

Pencegahan Konflik Sosial Kesbangpol, Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 25 Mei 2016, terungkap keterlibatan Daeng Koro, aktivis teroris yang paling dicari, eks Kopassus asal Palembang, yang bergabung dengan Kelompok Santoso, setelah keluarga isterinya asal Malino, Kabupaten Marowali Utara, tewas akibat operasi anti-teroris yang dilancarkan aparat kepolisian.

⁸² Wawancara dengan Kopol Fadly, Kepala Koordinasi Sekretaris Pimpinan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016. Juga, wawancara dengan Kopol Malsukri, Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) di Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016; dan wawancara dengan Kopol Sapruddin, Kepala Subbag Penmin, yang pernah bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016.

⁸³ "Kabar Pagi," *TV One*, 25 Mei 2016: 06.14.

⁸⁴ Hasil pengembangan penyelidikan aparat intelijen pasca-penggerebekan salah satu *base-camp* mereka di pedalaman Poso, yang terungkap dalam wawancara dengan Kopol Malsukri, Kasubbag Produk Bagian Analisa Ditintelpam Polda Sulawesi Tengah, pada 24 Mei 2016; wawancara dengan AKBP Saiful, Kepala Sub-Direktorat II, yang sebelumnya lama bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam), terutama di Poso, Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016; dan wawancara dengan Kopol Sapruddin, Kepala Subbag Penmin, yang pernah bertugas di bagian Intel dan Pengamanan (Intelpam) Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 24 Mei 2016.

disebut sebagai "Operasi Imbangan," yakni sebuah operasi teritorial lain, di luar dari yang sudah dilakukan selama ini, untuk mencegah aksi-aksi terorisme berimbas atau meluber ke wilayah-wilayah lain, terutama wilayah terdekat. Operasi tersebut perlu dilakukan dan diputuskan pimpinan lokal dan pusat TNI, karena aksi dan ideologi para tokoh, pengikut, pendukung dan simpatisan aksi-aksi terorisme tidak mudah dihentikan atau dipadamkan.⁸⁵ Kasus Poso adalah salah satu contohnya, sehingga aparat teritorial Korem 132/Tadulako, yang berinduk pada Kodam Wirabuana, di bawah komando panglimanya, Mayjen Agus Surya Bakti, mantan Deputy Deradikalisasi BNPT, perlu menggelar operasi semacam itu.⁸⁶

B. Kemiskinan, Kondisi Demografis, dan Posisi Geografis Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, terdapat kaitan antara melebarnya jurang kaya dan miskin, dan keterbelakangan dengan meningkatnya radikalisme dan ekstrimisme penganut agama dan aksi-aksi terorisme yang menyertainya. Hal ini tampak di berbagai negara di kawasan Timur-Tengah, Afrika Utara, dan Asia, dengan terus meningkatnya konflik antar-negara, sekte dan faksi, serta eskalasi kekerasan. Pelaku serangan di Paris pada 13 Nopember 2015 adalah imigran Prancis dan Belgia yang termarginalisasi. Yang di Belgia, mereka tinggal di Molenbeek, kantong kaum migran tempat pesemaian subur kelompok radikal, termasuk dalang serangan, Abdelhamid Abaaoud, yang pernah beberapa tahun berada di Suriah untuk bertempur bersama ISIS/IS.⁸⁷

Di Indonesia, angka kemiskinan secara realistis mengalami kenaikan sejak tahun 2004. Walaupun sempat menurun menjelang akhir tahun 2015, tetapi bersifat tidak signifikan.⁸⁸

⁸⁵ Wawancara dengan Danrem Tadulako pada 21 Juli 2016 di Rumah Bupati Poso.

⁸⁶ Wawancara dengan Letkol (Inf) Adrian Susanto, Kepala Staf Korem 132/Tadulako, Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 25 Mei 2016.

⁸⁷ Lihat, "Radikalisme dan Ancaman Teror Meluas," *Kompas*, 23 Desember 2015, h. 15.

⁸⁸ "Miskin di Kota dan di Desa," *Majalah Tempo*, 7-13 Maret 2106, h. 16.

Pulau Jawa, tempat berdiam penduduk terbanyak di negeri ini, memiliki jumlah orang miskin terbesar, yakni 15,31 juta orang. Pulau Sumatera yang kedua terbesar, dengan jumlah orang miskin sebanyak 6,31 juta orang. Selanjutnya, Pulau Sulawesi memiliki jumlah orang miskin, 2,19 juta orang, serta Bali dan NTB sebesar 2,18 juta orang.⁸⁹ Untuk hitungan per provinsi, di Jawa Timur terdapat 4.775 juta orang miskin, sehingga merupakan provinsi dengan orang miskin terbanyak. Berikutnya, Provinsi Jawa Tengah, dengan 4.505 juta orang miskin, dan Provinsi Jawa Barat, dengan 4.485 juta orang miskin. Sementara, secara persentase, Provinsi Papua menempati angka tertinggi di Indonesia, masing-masing dengan angka 28,40%. Adapun Provinsi NAD angka kemiskinan mencapai 22%, sebagai yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera Utara setelah Provinsi Lampung.⁹⁰

Relevansi kondisi angka kemiskinan ini dapat dilihat dalam analisis lebih lanjut di dalam riset ini yang menunjukkan kebanyakan para pengikut dan pendukung ISIS/IS datang dari wilayah-wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB, terutama pedesaan. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa penyebaran ajaran radikal melalui rumah-rumah ibadah dan ormas di Bima dan Dompu, dan wilayah sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) efektif berlangsung, termasuk yang di kalangan pekerja migran atau TKI lintas-negara, di antaranya Masdar, asal Lombok Timur, yang diduga terlibat ISIS dan telah dideportasi dari Korea Selatan. Juga, ada M. Arif Rahman Susanto alias Alan, yang bersama 7 WNI lain ditangkap aparat keamanan Turki hendak menyeberang ke Suriah.⁹¹ Sementara, di Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung relevansi tingginya angka kemiskinan diindikasikan dengan kecenderungan meningkatnya radikalisme di masyarakat mereka masing-masing belakangan ini. Sementara di

Papua, aksi-aksi terorisme datang dari pelaku separatisme atau pemberontakan bersenjata.

Turunnya angka Indeks Gini (rasio) di Indonesia hingga Desember 2015, ke angka 0,408 dari 2013 sejak tahun 2014,⁹² yang semakin merefleksikan tingkat ketimpangan pendapatan, membawa konsekuensi semakin rawannya struktur masyarakat yang ada terhadap pengaruh propaganda ISIS/IS. Perkembangan Rasio Gini seperti ini jauh dari menggambarkan perbaikan kondisi ekonomi di kalangan masyarakat terbawah. Sebab, ada 1 persen rumah tangga Indonesia menguasai 50 persen kekayaan bangsa.

Laporan Bank Dunia selama 2003-2010 lebih jauh lagi mengungkapkan, sebanyak 10 persen orang terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6 persen per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Namun, bagi 40% masyarakat miskin, tingkat konsumsi mereka hanya tumbuh kurang dari 2 persen per tahun.⁹³ Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan pendapatan yang tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir akibat disparitas pendapatan atau kesenjangan kesempatan yang diperoleh masyarakat di kota besar maupun daerah. Perkembangan angka Rasio Gini di atas mendeskripsikan kondisi kemiskinan dan ketimpangan, antar-kaya miskin dan antar-wilayah.

Kondisi perekonomian Indonesia seperti di atas menciptakan kerawanan sosial yang mudah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan destruktif, seperti menciptakan konflik sosial dan aktivitas mencari dukungan untuk aksi-aksi terorisme. Karena, penduduk usia produktif (15-65 tahun) berlimpah dan tidak memperoleh akses pendapatan akibat sempitnya lapangan kerja. Kemudian, akses masyarakat kepada pangan, sandang, papan, dan layanan publik semakin timpang. Angka Indeks Gini (rasio) Indonesia dewasa ini merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara,⁹⁴ sehingga termasuk sebagai

⁸⁹ Sumber Biro Pusat Statistik (BPS), lihat "Miskin di Kota dan di Desa," *Majalah Tempo*, 7-13 Maret 2016, h. 16, *ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Laporan Kunker Pansus RUU Anti-Terrorisme ke Bima, 21-23 Juli 2016.

⁹² Lihat, "Disparitas Pendapatan Picu Kerawanan Sosial," *Koran Jakarta*, 15 Desember 2015, h. 1.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *TV Berita Satu*, "Money Report": 21.15.

negeri yang sangat rawan terhadap berbagai gerakan, aktivitas, dan propaganda radikalisme ISIS/IS. Ini artinya, pengikut, pendukung, dan simpatisan baru gerakan terorisme internasional yang mengatasnamakan kepentingan Islam akan kian subur tumbuh, atau ancaman ISIS/IS rawan datang dari negeri yang dulu penduduknya sangat dikenal ramah dan dapat menerima perbedaan (kemajemukan).

Tidaklah mengherankan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan keadaan perekonomian Indonesia di depan rapim TNI, di Mabes TNI Cilangkap pada 16 Desember 2015. Secara serius, ia mengingatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial berbahaya, dan memberikan bahan bakar untuk menyulut radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, selain separatisme dan konflik sosial secara luas di masyarakat.⁹⁵ Terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional ini, Panglima TNI juga telah menegaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan pintu masuk bagi radikalisme dan terorisme, serta separatisme.⁹⁶

Wilayah-wilayah di Indonesia dengan kantong-kantong kemiskinan sangat rawan menjadi pusat perekrutan dan juga aktivitas kelompok-kelompok radikal keagamaan dan aksi-aksi terorisme mereka. Selain dari kasus di Molenbeek, Belgia, dan Montmartre di Prancis, perkembangan ini juga dapat dilihat di Jakarta Utara, Kabupaten Bandung dan lain-lain, tempat seringkali kelompok teroris digrebek dan ditangkap aparat keamanan. Sebagai contoh, Densus 88 Mabes Polri telah mencokok 3 terduga teroris ISIS/IS di Jakarta Utara dan Bandung, pada 8 Januari 2016. Salah seorang terduga teroris bekerja sebagai buruh harian pabrik sepatu di Rawa Badak Selatan. Dalam penangkapan di kediamannya ditemukan cairan kimia, surat-surat, buku-buku yang bersikan semangat jihad, dan bendera ISIS.⁹⁷

⁹⁵ "Kesenjangan Sosial Timbulkan Radikalisme," *Koran Jakarta*, 17 Desember 2015, h. 12.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Lihat, Dewi Rina Cahyani, "Polisi Cokok Tiga Terduga Teroris," *Koran Tempo*, 11 Januari 2016, h. 10.

Posisi geografis negara kepulauan Indonesia yang terletak di persimpangan jalur lalu-lintas manusia dan perdagangan dunia, membuatnya strategis dan sekaligus mudah dijadikan batu loncatan untuk masuk. Ini termasuk baik untuk sekadar kegiatan transit, sebelum melanjutkan perjalanan dan kegiatan ke daerah tujuan, maupun menetap untuk menjalankan berbagai agenda kegiatan yang bersifat individual, kelompok, ataupun organisasi, oleh para aktor non-negara dalam hubungan internasional yang semakin tidak mengenal batas (*borderless*). Posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia menjadi kian bernilai buat target ISIS/IS, mengingat peran Indonesia yang vital dalam perdagangan internasional dan juga sebagai jalur pelayaran internasional dan logistik, penghubung dunia Barat dan Timur di kawasan Asia-Pasifik yang kian mengglobal.⁹⁸

Kondisi negara kepulauan yang amat panjang pantainya, keempat terpanjang di dunia, setelah AS, Kanada, dan Rusia, yang terdiri dari 13 ribu lebih pulau-pulau, dengan banyak pulau-pulau kecil menyebabkan tersedianya banyak akses masuk, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi dan jalur-jalur gelap, yang sering disebut sebagai 'jalan tikus,' yang tidak terawasi dan dilengkapi dengan aparat imigrasi, bea-cukai, dan karantina. Sebagai negara maritim yang luas, akses masuk Indonesia sulit diawasi oleh aparat pertahanan dan keamanan laut. Upaya menjadikan wilayah Indonesia sebagai *safe haven* dan basis aktivitas gerakan radikal dan teroris semakin ideal, dan sebaliknya, menjadi rawan dan riskan bagi negeri ini, serta pemerintah dan penduduknya, melihat analisis internasional akhir-akhir ini yang mengungkap Laut China Selatan telah dijadikan jalur masuk alternatif bagi para pengikut ISIS/IS di kawasan Asia Tenggara, termasuk untuk kegiatan mereka masuk menuju dan keluar wilayah Indonesia.

Selama ini, sumber senjata teroris diperoleh secara ilegal, berasal dari aksi penyelundupan di wilayah hukum Indonesia, terutama jalur-jalur

⁹⁸ "Preventing aq caliphate in Indonesia," *The Jakarta Post*, January 5, 2016, h. 6, *loc.cit.*

tikus di wilayah pulau terluar yang sulit diawasi, seperti perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina Selatan, yang masih bergolak dan merupakan wilayah operasi kelompok separatis Moro, terutama Abu Sayyaf.⁹⁹ Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Totoni Hapilon, telah bersumpah setia kepada pemimpin ISIS/IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Ia mempunyai kekuatan sebanyak 300 militan, yang wilayah operasinya Filipina Selatan dan Malaysia Timur, dengan aksi terorisme seperti penculikan, pembunuhan, dan pengeboman.¹⁰⁰

C. Sukses Propaganda Ideologi ISIS/IS dan Implikasinya

Kemiskinan dan keterbelakangan memang bukan penyebab satu-satunya orang bergabung dengan kelompok teroris dan melakukan aksi-aksi terorisme di berbagai tempat dan negara. Sebab, dalam temuan terungkap bahwa pelaku, pengikut, pendukung, dan simpatisan gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional adalah juga berasal dari atau memiliki latar belakang kalangan ekonomi mapan dan yang mempunyai pendidikan tinggi. Dengan kata lain, ancaman atas serangan terorisme tidak hanya rawan muncul di negara-negara yang sarat dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi juga di negara-negara maju. Para aktor pelakunya pun tidak selalu mereka yang berasal dari kelompok termarjinalisasi, dengan pendidikan yang minim dan ekonomi tidak mampu, karena terdapat pula dari kalangan terdidik dan ekonomi yang terbilang mapan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNPT, Komjen Tito Karnavian, berdasarkan hasil penyelidikan BNPT dari kasus-kasus yang telah terjadi selama ini.¹⁰¹ Hasil survai yang dilakukan Wahid Foundation mengenai potensi radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia mendukung ini, mengingat dari

survai terhadap sekitar 150 juta masyarakat Muslim di Indonesia, 7,7% atau 11,5 juta orang berpotensi bertindak radikal, dan sebanyak 0,4% atau 600 ribu orang pernah terlibat dalam aksi radikalisme dan intoleransi.¹⁰²

Banyak tersedia dan terjangkaunya media sosial melalui penggunaan internet di *gadgets*, membuat propaganda gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional mudah disebarkan dan mencari pengaruhnya ke berbagai tempat dan wilayah, melintas negara, kawasan, dan benua. Dogma agama yang menjadi dasar ideologi kaum teroris pun mudah dibaca dan diterima, untuk dipahami, dibenarkan, dan didukung dalam aksi-aksi nyata oleh para pengguna *gadgets* dan media sosial baru. Karena itulah, munculnya berbagai jenis *gadgets* baru dan maraknya penggunaan internet telah menimbulkan kekhawatiran terhadap marak dan meningkatnya kampanye radikalisme para pengikut jejaring terorisme internasional. Salah satu contoh empiriknya adalah pengakuan Ustad Abdurahman Ayub, mantan Penasehat Mantiqi IV Jamaah Islamiyah (JI), yang pernah masuk ke dan terlibat dalam jejaring salah satu kelompok terorisme internasional tersebut. Orang tuanya berlatar belakang Pegawai Negeri (PNS) dan kakaknya adalah pengusaha.¹⁰³ Generasi muda yang labil, dari kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi, amat rawan terpengaruh oleh marak dan meningkatnya propaganda dan kampanye radikalisme gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional.

"Teologi maut" seperti yang dikatakan Ahmad Syafii Maarif memberikan daya tarik yang hebat untuk memanggil mereka yang berani mati, namun tidak berani hidup. Tidaklah mengherankan, terdapat kasus PNS, dokter, dan masyarakat sipil, yang diduga telah direkrut untuk bergabung dengan ISIS/IS.¹⁰⁴ Salah satunya adalah dosen bidang farmasi

⁹⁹ Lihat, Intan Pratiwi dan Eko Supriyadi, "Dana Terorisme dari Australia Rp. 7 M," *Republika*, 28 Januari 2016, h. 2.

¹⁰⁰ Lihat kembali, "Sejarah NIIS," *Kompas*, 23 Nopember 2015, h. 8, *loc.cit.*

¹⁰¹ Komjen Tito Karnavian dalam FGD "Evaluasi Pelaksanaan Otsus Papua," dengan Pansus Otonomi Khusus Papua di DPRRI pada 13 Juni 2016.

¹⁰² Dede Susanti, "11 Juta Muslim Indonesia Berpotensi Radikal," *Media Indonesia*, 2 Agustus 2016, h. 3.

¹⁰³ Lihat, "Terorisme dan Radikalisme Muncul Bukan Akibat Kemiskinan," *Pos Kota News.Com*, 1 Juni 2016.

¹⁰⁴ Neni Ridarineni dan Yulianingsih, "Waspadai Kelompok Radikal," *Republika*, 10 Januari 2016, h. 2.

Unsoed, asal Desa Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah, yang bersama isterinya, seorang pengelola apotek, dan juga anaknya, ditengarai telah pergi ke Suriah, masing-masing sejak Juli dan Oktober 2014.

Mobilitas yang tinggi, yang didukung perkembangan teknologi alat transportasi dan komunikasi yang sangat modern, telah memungkinkan para pelaku aksi terorisme, pendukung, dan simpatisannya ke wilayah manapun bergerak. Wilayah dengan latar belakang kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang tinggi, jauh lebih rawan sebagai pilihan para teroris untuk menjadikannya sebagai *safe haven*, basis perekrutan, organisasi dan kegiatannya. Di luar itu, marak berkembangnya aksi-aksi terorisme mengatasnamakan Islam terkait pula dengan pilihan jihad sebagai gaya hidup, seiring dengan maraknya penggunaan *gadgets*, khususnya media sosial *on line* yang menciptakan komunikasi berjejaring, serta propaganda *jihad* yang dilakukan para aktivis, pendukung, dan simpatisan ISIS/IS, yang menjangkau teman-teman, tetangga, dan keluarga.¹⁰⁵

Dalam sebuah kasus, seorang PNS di Batam telah dilaporkan BNPT hilang bersama keluarganya tahun 2015, dan telah berada di Suriah dan diduga telah bergabung dengan ISIS/IS.¹⁰⁶ Modusnya selalu serupa, hilang secara misterius berikut suami/isteri dan anak-anak mereka setelah bertemu atau diajak keluarga atau kenalan yang terlebih dulu telah menjadi pengikut dan pendukung ISIS/IS. Terdapat kesamaan karakter atau perilaku mereka yang telah direkrut dan hilang secara misterius itu, yang umumnya adalah orang yang dikenal pendiam, jarang bergaul, dan tidak akrab bertetangga.

Munculnya pendukung dan simpatisan di kalangan kelas menengah perkotaan terbantu oleh kehadiran fasilitas dan teknologi media sosial, terutama internet, yang dapat membuat semua orang di berbagai belahan

dunia terkoneksi dengan baik secara efisien, setiap saat. Globalisasi yang membuat semakin terbukanya akses antar-negara dan wilayah telah meningkatkan mobilitas atau pergerakan manusia lintas-negara dan tempat, dan merebaknya dengan cepat pengaruh radikalisme. Kemajuan teknologi membuat tidak ada lagi tempat-tempat di dunia ini yang terisolasi dan tidak terjangkau para pengikut teroris dan perencana serangan. Sebagai akibatnya, kampanye radikalisasi ISIS/IS untuk mencari pengikut, pendukung, dan simpatisan baru menjadi lebih mudah dilakukan di berbagai negara. Bahkan, Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai tempat tumbuh suburnya Islam yang moderat dan damai, kini dikuatirkan menjadi tempat yang subur munculnya para pengikut, pendukung dan simpatisan Islam radikal, yang kelak bergabung dengan pelaku aksi-aksi terorisme internasional pro-ISIS/IS.

Dengan kata lain, globalisasi telah memicu munculnya *homegrowing terrorists* di Indonesia. Sebab, identitas Islam Indonesia yang moderat dan kaya dengan latar belakang yang berbeda, karena persinggungan dalam sejarah selama berabad-abad dengan berbagai budaya, etnisitas dan lain-lain menjadi terkikis oleh globalisasi dan pranata pendukungnya. Akar tradisi Islam Nusantara pun kemudian tersingkir oleh ajaran Islam yang sempit dan penuh doktrin radikal, yang ditafsirkan tanpa pemikiran logis dan kritis, yaitu ajaran Wahabi dan Salafi. Kekeliruan Barat dalam mengintroduksi kebijakannya di banyak negara dengan mayoritas Islam, terutama di Timur-Tengah, memberikan justifikasi atas pandangan mereka yang berpandangan Wahabi dan Salafi, terutama Salafi-Jihadisme,¹⁰⁷ yang sangat konservatif dan radikal, mudah menghalalkan kampanye/kebijakan kekerasan kepada semua pihak yang dianggap keliru, tanpa mengenal umur, dapat memahami kondisi yang ada, dan menerima alasan/argumentasi agama yang logis. Kelompok yang berpandangan seperti ini bahkan dengan mudah memperluas konsep tentang kafir, yang mendefinisikan semakin luas, mencakup kalangan sendiri

¹⁰⁵ Lihat, Noor Huda Ismail, "Being a jihadist as a lifestyle," *The Jakarta Post*, January 8, 2016, h. 2.

¹⁰⁶ Agus Maryono, "C. Java state university lecturer joins IS in Syria," *The Jakarta Post*, January 11, 2016, h. 1.

¹⁰⁷ Maher, 2016, *op.cit.*

(sesama penganut Islam). Propaganda ISIS/IS secara efektif menyebar di kalangan, dan diserap, kaum muda melalui interpretasi ajaran agama yang telah dimanipulasi. Konsep-konsep kunci keagamaan telah disalahgunakan dan disalahartikan oleh para penyebar, para aktifis gerakan terorisme pro-ISIS/IS. Beberapa contoh mengenai ini adalah soal *irhab* (teror), *takfir* (sesat), *qital* (perang), *unuf* (kekerasan), *bughat* (pemberontak), *baiat*, *hijrah*, dan *khilafah*.

Kemajuan teknologi informasi telah membuat ISIS/IS dapat merekrut calon-calon teroris baru dengan menggunakan media daring (*online*), sehingga fenomena ini diidentifikasi sebagai dampak buruk globalisasi.¹⁰⁸ Analisis telah melihat kaum imigran, terutama anak-anak mereka, telah menjadi sasaran empuk dari para agen propaganda dan perekrut ISIS/IS, tidak terkecuali mereka yang berbasis jauh di Suriah dan Irak.

Hasil penyelidikan aparat penegak hukum mengungkapkan banyak pelaku aksi-aksi terorisme melakukan perbuatannya akibat telah terprovokasi oleh ajaran atau ceramah tokoh-tokoh Islam radikal, termasuk yang disampaikan melalui media daring, walaupun tidak memerintahkannya secara langsung. Juga, kebanyakan pelaku teror pro-ISIS menjalankan aksi-aksi mereka setelah mendengarkan ceramah dari para provokator dan penyebar kebencian (*hate speech*), sehingga kemudian terinspirasi dan tergerak untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Sehingga, setelah pelaku aksi-aksi teroris tertangkap, jika pembuat dan penyebar kebencian tidak ditangkap dan dihukum, dan dikoreksi pikirannya, aksi-aksi terorisme sulit dihentikan, sebab upaya provokasi terus berlangsung.¹⁰⁹ Untuk itulah, UU yang ada harus memberi hukuman terhadap pembuat dan penyebar *hate speech* tersebut.

Penetrasi ideologi dan propaganda pengikut ISIS/IS dan kelompok atau jejaring terorisme

internasional juga dilakukan melalui kegiatan tatap muka setelah para aktivis dan pengikut ISIS/IS pelaku jihad di Suriah dan Irak kembali ke negara mereka masing-masing. Ribuan warga negara asing yang kembali ke negara mereka masing-masing setelah bertahun-tahun berjihad bersama ISIS/IS di Timur-Tengah, sebagai anggota atau pimpinan milisi tempur, telah hidup bergabung dengan penduduk lokal, serta menularkan kepercayaan dan ideologi ekstrim mereka.¹¹⁰ Sebagaimana diungkapkan oleh analisis konflik dan keamanan yang telah lama tinggal dan mengamati di Indonesia, Sidney Jones, terdapat sekitar 200 orang Indonesia yang telah bergabung dengan milisi ISIS/IS di Suriah. Sedangkan lembaga kajian politik internasional, The Soufan Group, menjelaskan ada sekitar 700 orang Indonesia yang telah bertempur bersama ISIS/IS, dan 162 di antaranya telah kembali ke Indonesia.¹¹¹

Laporan intelijen dan aparat keamanan internasional, seperti yang disampaikan Jaksa Agung Australia, George Brandis, telah mengungkapkan bahwa ISIS/IS yang berbasis di Suriah dan Irak sedang berusaha mendirikan apa yang disebut “khalifah jauh” di Indonesia, yang akan menjadi ancaman keamanan bagi Australia dan kepentingan Barat di kawasan.¹¹² Hal ini disebut sebagai “kekhalifahan provinsi,” sebagai bagian dari ISIS yang berbasis di Suriah dan Irak. Secara tegas dikatakan, ISIS/IS mempunyai ambisi kuat untuk meningkatkan kehadiran dan meningkatkan kegiatannya di Indonesia, dengan menargetkan pusat-pusat perbelanjaan, kantor polisi, dan kelompok minoritas di seluruh negeri, baik secara langsung maupun tidak. Berbeda dengan penilaian otoritas Australia yang melihat peluang ISIS/IS untuk membentuk khalifah di wilayah Indonesia yang kecil, penulis justru memiliki pendapat yang berbeda. Karena, peluang ISIS/IS untuk menancapkan pengaruh mereka secara permanen ada, dengan melihat perkembangan

¹⁰⁸ Penilaian antropolog Scott Atran dalam *Time*, November 20, 2015, dalam “Radikalisme dan Ancaman Teror Meluas,” *Kompas*, 23 Desember 2015, h. 15.

¹⁰⁹ Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Arief Dharmawan, dalam Christian Dior Simbolon, “Haters Belum Tersentuh,” *Media Indonesia*, 9 April 2016, h. 4.

¹¹⁰ “Radikalisme dan Ancaman Teror Meluas,” *Kompas*, 23 Desember 2015, *loc.cit.*, h. 15.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Lihat, “IS Hendak Bentuk Khalifah Jauh,” *Media Indonesia*, 23 Desember 2015, h. 26.

sejarah politik Indonesia, khususnya Islam dan kelompok-kelompok keagamaan yang mempengaruhinya.

Meningkatnya ancaman ISIS/IS juga telah disebabkan oleh suksesnya propaganda radikalisme mereka di Indonesia melalui pertemuan para aktor, pengikut, pendukung dan sponsor di media sosial. Di Indonesia, orang mudah melihat propaganda para aktor dan pengikut ISIS/IS melalui *Youtube*, yang melibatkan anak-anak asal Indonesia yang masih di bawah umur, yang menampilkan tokoh Abu Jandal Al-Yamani Al-Indonesi, yang pernah diperlihatkan di TV.¹¹³ Paling sedikit terdapat 2 video propaganda ISIS/IS dan seruan mereka untuk bergabung yang ditujukan pada publik Indonesia, termasuk anak-anak. Menanggapi kontroversi apakah video itu benar-benar memanfaatkan anak-anak Indonesia, Menko Polhukam, Luhut B. Panjaitan, menduga video itu bukan rekayasa, karena anak-anak, apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, telah dijadikan target perekrutan oleh ISIS/IS.¹¹⁴

Sukses radikalisme yang dilakukan ISIS/IS tampak dalam kasus aksi terorisme pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 6-7 Juli 2016 di Jawa Timur, yang berhasil digagalkan Densus 88. Salah satu pelaku, yang berhasil ditangkap di Surabaya, yakni Jefri, terungkap pernah bekerja dengan Abu Jandal. Ia dengan pelaku lainnya yang telah tertangkap, yakni Feri Novendi, mengaku menjadi semakin radikal setelah mendapat pengaruh dari media sosial. Terduga teroris lainnya, Priyo Hadi Purnomo, yang telah disiapkan sebagai 'pengantin' pelaku serangan teroris pro-ISIS/IS mengaku telah terpengaruh oleh 2 penyebar paham radikal ISIS/IS di Lapas Porong, Jawa Timur, yaitu Sibghotullah dan Muhammad Soleh, pada 2014. Penyebar kampanye radikal ISIS pertama, Sibghotullah, adalah napi kasus terorisme dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Agustus 2010, yang pernah terlibat

¹¹³ Pernah penulis lihat di situs berita *yahoo.com* pada 18-19 Mei 2016. Lihat pula, Agung Sedayu, "ISIS Diduga Incar Anak Indonesia," *Koran Tempo*, 23 Mei 2016, h. 9.

¹¹⁴ *Ibid.*

dalam konflik di Ambon dan Poso. Sedangkan, kedua, Soleh, merupakan aktor serangan teroris dengan peledakan bom di kawasan Cimanggis, Depok, tahun 2004.

Di Aceh, sedikit berbeda dengan penjelasan aparat pemerintah daerah (pemda) dari Kesbangpol-Linmas (Perlindungan Masyarakat), pendapat peneliti UIN Ar-Raniry Aceh dan Bagian Analisa Intelkam Polda Aceh mengungkapkan bahwa potensi radikalisme cenderung meningkat belakangan ini, yang justru terjadi 11 tahun pasca-Tsunami. Hal ini tercermin dari mulai merebaknya konflik-konflik horizontal, baik dengan kelompok agama lain, maupun di kalangan internal Islam sendiri, antara lain terkait praktik beribadah yang berbeda di kalangan umat Islam, pendirian rumah ibadah kalangan sendiri ataupun lain, dan penyebaran ajaran teologi yang berbeda. Ini berlangsung karena masuknya pengaruh dari luar, terutama Timur-Tengah, baik secara langsung maupun tidak, akibat derasnya arus globalisasi karena semakin terbukanya provinsi itu dengan dunia luar dan mobilitas penduduk lokal yang tinggi belakangan ini.¹¹⁵ Penulis sendiri melihat potensi radikalisme dan konservatisme beragama di Aceh tetap amat rentan dari upaya pengikut ISIS/IS mencari pengaruh dan merekrut pengikut baru, serta mencari pendukung dan simpatisannya di kalangan masyarakat di sana. Hal ini didukung oleh penilaian peneliti UIN Ar-Raniry Aceh dan Bagian Analisa Intelkam Polda Aceh, yang mengungkapkan bahwa mereka telah menyadari kecenderungan perkembangan itu sejak beberapa tahun belakangan. Mereka juga sependapat bahwa kondisi ini rentan dimanfaatkan oleh para aktivis pro-ISIS/IS untuk tujuan kepentingan ideologi dan perwujudan cita-cita transnasional mereka. Apalagi jika melihat adanya realitas dalam

¹¹⁵ Kamaruzzaman B. Ahmad, Konperensi Internasional "From Human Rights to Human Security: Rethinking Nation from Civil Society Perspective," pada 10 Agustus 2016 di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh; wawancara dengan Kepala Bagian Analisa Intelkam Polda Aceh, AKBP Godman Sigiro, di Kota Banda Aceh, Provinsi NAD, pada 11 Agustus 2016.

masyarakat Aceh yang merespons upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah justru dengan upaya meningkatkan sikap radikalisme mereka.¹¹⁶

Baik disadari atau tidak, pers terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memperluas propaganda kaum teroris dalam rencana dan aksi-aksinya. Hal ini bisa terjadi karena teknik-teknik pemberitaan yang keliru, tidak profesional, yang melanggar etika dan Kode Etik Pers.¹¹⁷ Pemberitaan yang subyektif, demi mengejar penambahan oplah dan meningkatkan *rating*, ditunggangi kepentingan bisnis semata, mendukung popularitas para pelaku terorisme dan sukses aksi-aksi mereka, dan sebaliknya, kontraproduktif dengan perang melawan terorisme.¹¹⁸ Hal inilah yang berada di balik meningkatnya simpati dan datangnya para pengikut dan pendukung baru ISIS/IS di berbagai belahan dunia dan negara, termasuk mereka yang datang mendukung Kelompok Santoso, dari wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa¹¹⁹ dan Bima, serta mancanegara, yakni Uighur, China,¹²⁰ selain dari daerah setempat.¹²¹ Sementara, aparat menjadi kewalahan, karena

citranya semakin negatif di mata masyarakat, terlebih jika ada tindakan yang salah dari aparat.

Media massa/pers, melalui pemberitaannya yang tidak profesional dan menyalahi Kode Etik, dan semata mementingkan bisnis perusahaannya, telah menyumbang dalam menyebabkan gagalnya deradikalisasi yang dijalankan selama ini oleh aparat, terutama kepolisian. Sebaliknya, dengan pemberitaan yang profesional dan memperhitungkan kepentingan publik, simpati dan dukungan terhadap kaum teroris dan aksi-aksi mereka dapat dihentikan dan dicegah. Sebagai contoh, aliran dana filantropi dari masyarakat ke lembaga Wandah Islamiyah, setelah diketahui disalurkan untuk aksi-aksi terorisme, dapat segera disetop.¹²² Karena itulah, BNPT perlu melakukan lokakarya, sebagai upaya lain dari deradikalisasi, melalui perbaikan peran media massa/pers, dengan kampanye *soft journalism*, dalam mendukung upaya pemerintah melawan terorisme, seperti yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada 26 Mei 2016. Peran media massa/pers yang besar dalam melahirkan simpati dan dukungan terhadap para teroris dan aksi-aksi mereka telah meningkatkan kekuatiran peneliti dan pengamat terorisme atas implikasinya di kalangan generasi muda atau mahasiswa di kampus, yang lebih rentan terpengaruh.¹²³

Pasca-bom bunuh diri di Paris 13 Nopember 2015, ancaman ISIS/IS di Indonesia dinilai semakin realistis, mengingat sekitar seminggu sesudahnya, yaitu 22 Nopember 2015, diberitakan adanya rencana serangan ISIS/IS terhadap kegiatan keagamaan kelompok Shiah di Karawang, Jawa Barat.¹²⁴ Sebuah akun

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Presentasi Eko Maryadi, mantan Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Ketua SEAPA di forum "Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers dalam Meliput Isu-isu Terorisme," di Kota Palu, pada 26 Mei 2016.

¹¹⁸ Presentasi Dr. Rahmat Bakri SH, MH, Wakil Pimpinan Redaksi Radar Sulteng, di forum "Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers dalam Meliput Isu-isu Terorisme," di Kota Palu, pada 26 Mei 2016; juga, wawancara dengan Eko Maryadi, mantan Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Ketua SEAPA di Kota Palu, pada 26 Mei 2016.

¹¹⁹ Antara lain, Firman alias Aco alias Ikrima, yang tewas dalam Operasi Tinombala, lihat, "Kapolri: Dua Jenazah Kelompok Santoso Belum Diserahkan ke Keluarga," *Mercusuar*, 31 Mei 2016, h. 1 & 15.

¹²⁰ Enam orang Uighur yang bertempur bersama Santoso telah tewas akibat Operasi Tinombala di Gunung Biru, Poso, yang tengah berlangsung ketika penelitian ini dilakukan. Juga, Santoso alias Abu Wardah, pemimpin mereka, tewas tertembak dalam operasi melibatkan pasukan khusus TNI pada 18 Mei 2016.

¹²¹ Seperti, Yazid alias Taufik dari Malino, Poso, selain Santoso alias Abu Wardah, pemimpin mereka, yang bersama Firman alias Aco alias Ikrima tewas tertembak dalam operasi Polri/TNI pada 18 Mei 2016, *ibid.*

¹²² Presentasi Dr. Muhammad Khairil, SAg, MSi, Ketua Prodi Komunikasi dan peneliti terorisme dari Universitas Tadulako, di forum "Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers dalam Meliput Isu-isu Terorisme," di Kota Palu, pada 26 Mei 2016.

¹²³ Wawancara dengan Dr. Muhammad Khairil, Sag, Msi, Ketua Prodi Komunikasi dan Peneliti Terorisme, yang sekaligus pengajar di Universitas Tadulako, di Kota Palu, pada 26 Mei 2016.

¹²⁴ Muhammad Iksan Mahar, "Predator Nyata di Dunia Maya," *Kompas*, 17 Desember 2015, h. 5.

Facebook juga telah mengunggah rekaman audio yang diduga milik Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam rekaman yang berjudul 'Seruan Sang Komandan' berdurasi 9 menit itu, Santoso mengancam akan melakukan aksi terorisme di markas Polda Metro Jaya dan Istana Merdeka, dalam rangka mewujudkan impiannya mendirikan khilafah di Indonesia.¹²⁵ Sebelumnya, jaringan ISIS/IS di Indonesia juga telah mengumbar ancaman teror terhadap peringatan/perayaan 17 Agustus 2015 di Solo, Jawa Tengah. Dari investigasi aparat keamanan diketahui, propaganda mereka ini didukung logistik dan panduan aksi teror langsung dari aktivis ISIS/IS di Suriah. Diidentifikasi, 4 orang aktivis ISIS/IS di Indonesia tersebut telah melakukan komunikasi dengan menggunakan grup percakapan di media sosial.¹²⁶ Juga patut diperhatikan, undangan untuk bergabung dengan grup percakapan jejaring ISIS/IS dalam Twitter, mudah ditemukan.

Lemahnya upaya kontra-narasi, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-radikalisasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat (pemuka agama) telah mengakibatkan suksesnya propaganda terorisme ISIS/IS di Indonesia. Bertemu dengan faktor kemiskinan serta kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang meningkat, Indonesia, dengan berbagai kemajemukannya, kedamaian, dan kehidupan harmonis antar-warganya pun menjadi terancam. Sementara, ISIS/IS dapat meraup simpati dan dukungan dari tingkat lokal, daerah, nasional, regional/internasional, termasuk secara logistik di lapangan. Salah satu contohnya adalah tertangkapnya seorang warga oleh aparat keamanan ketika hendak memberikan bantuan beras pada Kelompok Santoso di Poso.¹²⁷

Ancaman yang datang dari maraknya kampanye radikalisme oleh gerakan terorisme internasional, khususnya ISIS/IS, melalui

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Wawancara dengan Eko Maryadi, mantan Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Ketua SEAPA di Kota Palu, pada 26 Mei 2016.

internet dan media sosial sangat sulit diatasi. Sebaliknya, upaya untuk melakukan deradikalisasi juga tidak mudah dilakukan oleh aparat terkait. Dengan demikian, *cyber terrorism*, yang salah satu unsurnya adalah *hate speech*, yang marak belakangan ini di kalangan masyarakat Indonesia, juga tidak mudah diatasi, walaupun institusi internasional PBB telah menyadari dampaknya dan telah juga menyerukan upaya menentangnya melalui pembuatan peraturan hukum. Hal ini diungkapkan oleh Densus 88 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau *hearing* dengan Pansus RUU Amandemen UU Anti-terorisme No. 15/2003, di parlemen (DPRRI), pada 15 Juni 2016.

Sulitnya upaya deradikalisasi diakui oleh pemerintah. Sekalipun pemerintah pernah mengambil tindakan menutup situs-situs di dunia maya yang menyebarkan radikalisme (sekitar 26 situs yang telah menyalahgunakan ajaran Islam),¹²⁸ namun situs-situs baru bermunculan, dan penyebaran ajaran radikal berlangsung kian marak. Realitas ini menunjukkan pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman penyebaran radikalisme agama yang mendorong munculnya pengikut, pelaku, dan aksi-aksi terorisme baru. Kurangnya respons, apalagi ketidakpedulian pemuka agama sama sekali dalam memerangi kontra-narasi radikalisme, menyebabkan masifnya penyebaran paham radikal dan meningkatnya ancaman terorisme yang menyalahgunakan ajaran agama.

D. Kekosongan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Aksi-aksi terorisme internasional mudah berulang di Indonesia, karena terdapatnya kekosongan hukum untuk mencegahnya sejak dini. Dalam tindakannya, ISIS/IS sendiri telah memperlihatkan pola operasi dan aksi-aksi yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini telah ditunjukkan oleh Kelompok Taliban dan Al-Qaeda. Itulah sebabnya, terorisme bukan lagi merupakan bahaya laten, namun sudah

¹²⁸ "Radikalisme Masih Tumbuh Subur di Dunia Maya," *Kompas*, 2 Mei 2016, h. 4.

menjadi ancaman nyata yang menakutkan di Indonesia.¹²⁹ Ia bukan lagi kejahatan biasa, tetapi serius, yang kegiatannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Upaya mencegah, menangkal, menangani dan memerangnya secara total menjadi tidak mudah, karena merebaknya radikalisme di masyarakat akibat pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis. Sementara, kritik terhadap penanganan yang tidak profesional dan berpotensi pelanggaran HAM begitu kuat di lingkup masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

UU Anti-Terrorisme (UU No. 15/2003) sendiri tidak bisa digunakan untuk menjerat dengan aturan pidana bagi orang yang bergabung dengan ISIS/IS, atau untuk menangkap mereka yang baru melakukan aksi jihad di Timur-Tengah, khususnya di Suriah dan Irak. Juga, tidak bisa digunakan untuk menangkap mereka yang menyebarkan propaganda jihad, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS, sehingga, UU Anti-Terrorisme perlu direvisi.¹³⁰ Pendapat ini didukung oleh analisis masalah terorisme dan konflik seperti Sidney Jones, yang sejak awal menentang pendapat bahwa perang melawan ISIS/IS adalah sebuah proyek konspiratif baru Israel, termasuk di Indonesia, sebagai sebuah negara dengan potensi ancaman yang sangat besar di kawasan.¹³¹ Pandangan yang ambigu terhadap pentingnya dilakukan penyusunan dan pembahasan UU anti-terorisme yang baru memang tampak di kalangan anggota parlemen. Mereka masih melihat adanya faktor pesanan atau intervensi pihak asing dalam menekan Indonesia agar membuat UU baru anti-terorisme yang jauh lebih tegas.

¹²⁹ Keterangan Menkumham, Yasonna H. Laoly, dalam menyampaikan RUU tentang perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU, di depan Raker dengan Pansus DPR, pada 27 April 2016.

¹³⁰ "Saud Usman Nasution, Kepala BNPT: Masalahnya, Belum Ada Jerat Pidana Bagi Seseorang yang Bergabung dengan ISIS," *Rakyat Merdeka*, 7 Desember 2015, h. 2.

¹³¹ Sydney Jones dalam Dialog Kebangsaan "Deradikalisasi Kaum Muda: Memajukan Komitmen Kepemudaan dalam Bingkai NKRI yang Damai," 29 Februari 2016, Kemenpora-KNPI, Wisma Pemuda, Senayan, Jakarta.

Namun, Jones secara eksplisit mengungkap kelemahan yang ada dalam UU Anti-Terrorisme itu, termasuk soal keterbatasan peran dan kewenangan institusi penyidik dan intelejen seperti Polri, BIN, dan TNI, khususnya kewenangan dalam menjalankan penangkapan untuk melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan lebih jauh. Tetapi, ia juga mengingatkan, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengamandemen UU Anti-Terrorisme, agar tidak berlebihan dan mengancam kebebasan sipil dan membuka peluang bagi pelanggaran HAM. Gagasan penghapusan kewarganegaraan para aktivis ISIS/IS yang telah berjihad ke Timur-Tengah, khususnya Suriah dan Irak, harus diperhitungkan dampaknya, karena dapat menciptakan banyak WNI yang menjadi *stateless*.¹³² Kondisi ini justru akan menyulitkan pengusutan dan penindakan lebih lanjut atau penegakan hukum secara tuntas terhadap kasus-kasus mereka yang diduga sebagai aktivis ISIS/IS dan pelaku aksi-aksi terorisme internasional, selain turut mengundang kritik terhadap pelanggaran HAM.¹³³

Demikian pula, dengan penahanan sampai batas waktu sampai 6 bulan atau tidak tentu terhadap terduga pengikut ISIS/IS dan pelaku aksi terorisme, kebijakan ini harus dikoreksi. Sebab, selain menimbulkan ketidakpastian yang melunturkan wibawa dan citra aparat penegak hukum, hal ini juga rawan memancing kritik dari para aktivis HAM. tetapi, terkait dengan mereka yang pernah mengikuti kegiatan *jihad* di Timur-Tengah bersama ISIS/IS, terutama ke Suriah dan Irak, serta terhadap mereka yang telah mengikuti pelatihan militer bersama dan bersumpah setia pada ISIS/IS, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas, dengan mengenakan sanksi hukuman pidana pada mereka yang telah melakukannya, agar dapat menghentikan kegiatan semacam ini.¹³⁴

¹³² Wawancara dengan Sidney Jones, analisis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

¹³³ Lihat, Al-Araf, "Pencabutan Kewarganegaraan," *Kompas*, 5 April 2016, h. 6.

¹³⁴ Wawancara dengan Sidney Jones, analisis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

Manajemen dan administrasi rumah-rumah tahanan yang buruk, serta kondisi penjara tempat penahanan kelompok radikal aktivis, pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS yang tidak memadai, perlu diperbaiki. Indonesia tidak perlu menciptakan atau meniru penjara Guantanamo AS di Kuba, yang telah digunakan untuk menangani para napi teroris pengikut Al-Qaeda. Yang dibutuhkan adalah sistem dan pengelolaan penjara untuk napi terorisme secara lebih baik dan hati-hati, agar penjara tidak menjadi sekolah baru untuk memperbaiki dan meningkatkan keahlian mereka dalam merencanakan dan melancarkan aksi-aksi terorisme internasional baru. Seperti dikatakan aparat negara yang menangani langsung masalah terorisme, khususnya napi teroris, tahanan teroris tidak boleh disatukan begitu saja dengan tahanan umumnya, apalagi mereka para tokoh inspirator dan pelaku utama aksi-aksi terorisme, karena mereka rawan dalam menyebarkan pemikiran dan pengaruh mereka, untuk mencari pengikut dan simpatisan baru.¹³⁵ Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan kehadiran SDM yang terdidik baik dan memahami penanganan masalah terorisme internasional. Mereka harus memiliki kemampuan dalam memantau perkembangan dan mengevaluasi perilaku ekstrim para aktivis dan pengikut ISIS/IS.

Kecuali untuk yang tidak berkategori keras pandangan ideologinya, untuk kalangan simpatisan ISIS/IS yang masih mungkin dikoreksi pemikirannya, para napi teroris dapat digabung dengan napi umum, sehingga mereka bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan diharapkan dapat memahami kekeliruannya, juga melalui juga interaksi dengan pemuka agama yang ditugaskan pemerintah.¹³⁶ Jones melihat, jika ditangani dengan baik, napi teroris

yang berkategori berat pun dapat memahami kekeliruannya. Sebaliknya, penanganan yang represif dan keliru dapat melahirkan para pengikut terorisme internasional baru dan memicu aksi-aksi baru yang jauh lebih berbahaya. Namun, terhadap napi teroris yang masuk dalam kategori penyebar ideologi, tetap dibutuhkan penanganan khusus, dengan isolasi, mengingat pengalaman empirik yang terjadi selama ini dan resiko tinggi yang dihadapi negara. Karena itu, Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman dikirim ke blok isolasi di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, yang tidak terjangkau sinyal telpon seluler, sejak 9 Februari 2016.¹³⁷ Jadi penanganan untuk mereka dibedakan dengan mereka yang berkategori sekadar simpatisan dan garis keras sekalipun.

UU Kepabebean juga perlu direvisi agar Polri memiliki kewenangan dalam menangani kasus penyelundupan senjata dan bahan kimia, serta barang-barang lain yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris di wilayah kepabebean Indonesia. Demikian pula, terhadap UU tentang Kebebasan Berpendapat dan UU Ormas yang memiliki kelemahan, sehingga mudah disalahgunakan celahnya, terkait propaganda dan penyebaran ajaran radikal para guru agama di sekolah-sekolah agama tradisional dan media sosial dalam aktivitas yang mereka sebut sebagai syiar.

Hasil pemeriksaan Densus 88 mengungkap, senjata para pelaku serangan terorisme berasal dari lapas, seperti Lapas Kelas IA Tangerang. Hasil investigasi lebih jauh mengungkap sebanyak 9 pucuk senjata berasal dari sana. Sementara itu, dilaporkan, beberapa senjata telah dilaporkan hilang, yaitu 7 pucuk pistol Bernadelli kaliber 3,2 mm, 1 pucuk Colt kaliber 3,8 mm, 1 pucuk P3A kaliber 3,2 mm, dan amunisi 3,2 mm. Sedangkan dari seorang napi diperoleh pengakuan bahwa senjata keluar dari lapas secara bertahap, yakni pada 23 Desember 2015 sebanyak 5 pucuk, dan 13 Januari 2016

¹³⁵ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Densus 88 dengan pimpinan dan anggota Pansus RUU Amandemen UU Anti-Terrorisme No. 15/2003, di DPRRI, pada 15 Juni 2016.

¹³⁶ Wawancara dengan Sidney Jones, analis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

¹³⁷ Rosarians, Fransisco. "Pemerintah Berkukuh Isolasi Ba'asyir dan Abdurrahman." *Koran Tempo*, 11 April 2016, h. 9.

--hanya sehari saja sebelum serangan teroris pada 14 Januari 2106 di Sarinah, Jakarta-- sebanyak 4 pucuk.¹³⁸

Juga, rendahnya profesionalisme aparat penegakan hukum dalam menangkap dan mencegah aksi teroris masih ditemui. Kejadian salah tembak di lapangan telah membuat kian rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bersamaan dengan absennya *critical thinking* dan rendahnya keinginan untuk mencari informasi alternatif mengenai ancaman terorisme internasional yang datang dari ISIS/IS di kalangan kelas menengah dan intelektual Indonesia, dan sinisme yang berkembang terhadap kinerja aparat penegak hukum, menyebabkan mengapa selama ini isu munculnya ISIS/IS dan ancaman terorisme internasional mereka masih dianggap sebagai proyek (baru) rekayasa AS, Barat, dan Zionis Israel.¹³⁹

Seringkali, secara sinis, adanya ancaman baru aksi-aksi terorisme tersebut dikatakan sebagai proyek baru aparat polisi untuk meminta anggaran baru lebih banyak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka (operasi) penegakan hukum terhadap mereka. Sinisme ini berkembang akibat kinerja aparat keamanan dan penegak hukum yang belum berhasil menangkap Santoso setelah operasi sejak September 2015 lalu, yang telah melibatkan sekitar 3000 polisi dan TNI - tidak hanya pasukan anti-teroris Densus 88- dan kini dilanjutkan dengan Operasi Tinombala, yang telah melibatkan 10 ribu pasukan, termasuk pasukan khusus dari TNI.¹⁴⁰ Tentu saja, tanpa perubahan cara penilaian ini, keadaan ini mengakibatkan semakin rawannya Indonesia atas ancaman ISIS/IS.

Untuk memperbaiki citra dan reputasi aparat penegak hukum Indonesia dalam perang

melawan terorisme memang perlu dilakukan koreksi terhadap kinerja Densus 88. Ini mendesak dilakukan, selain untuk menghindari tekanan pembubaran Densus 88, juga untuk menghindari terulangnya terus kasus Siyono, yang tewas akibat tidak dijalankannya SOP (*Standard Operating Procedure*).¹⁴¹ Sebab, terdapat sebanyak 120 kasus yang disebut sebagai pelanggaran HAM, yang mirip dengan kasus Siyono ini, terkait tindakan aparat penegak hukum dalam perang melawan terorisme.

Sikap dan respons aparat dalam hal ini, selain dinilai tidak profesional dalam menindak mereka yang dicurigai sebagai pihak yang terlibat dan pelaku aksi-aksi terorisme, juga dinilai tidak transparan, akuntabel, dan adil dalam menjalankan proses hukum mengungkap semua kasus ini.¹⁴² Ketidakprofesionalan juga telah dikeluhkan secara langsung oleh masyarakat, seperti Tim Pembela Muslim, yang selama ini menangani pengaduan atas kasus-kasus salah tangkap dan respons aparat keamanan yang berlebihan terhadap mereka yang dituding sebagai terduga teroris.¹⁴³ Namun, kondisi atas kinerja aparat penegak hukum yang belum memuaskan itu tidak boleh dibelokkan oleh pihak-pihak yang belum memahami, apalagi yang sejak awal telah memperlihatkan sikap antipati, untuk menekan pemerintah dan DPR agar membubarkan Densus 88, dan sebaliknya, simpati pada kelompok-kelompok garis keras dan membiarkan para tokoh penyebar, pelaku, dan pendukung aksi-aksi terorisme. Sebab, jika ini yang berlangsung, seperti halnya yang tampak dalam aksi unjuk rasa mahasiswa UGM, Yogyakarta, pada 15 April 2016, yang menyerukan pembubaran Densus 88,¹⁴⁴ yang telah susah payah berusaha

¹³⁸ Pratiwi dan Supriyadi, *Republika*, 28 Januari 2016, h. 2, *loc. cit.*

¹³⁹ Wawancara dengan Sidney Jones, analis keamanan dan terorisme internasional, Direktur the Institute for Policy and Analysis of Conflict (IPAC), di Jakarta, pada 4 April 2016.

¹⁴⁰ Ruslan Sangaji, "MIT bought firearms from separatist group in Philippines," *The Jakarta Post*, April 6, 2016, h. 5.

¹⁴¹ Lihat, Reja Irfa Widodo dan Umi Nur Fadhilah, "Densus Ciptakan Radikalitas," *Republika*, 13 April 2016, h. 9.

¹⁴² Lihat, pendapat Hafid Abbas, Komisioner Komnas HAM, dalam "Ada 120 Kasus Yang Mirip Kasus Siyono," *Rakyat Merdeka*, 15 April 2016, h. 2.

¹⁴³ Keterangan Tim Pembela Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus RUU Amandemen UU Anti-Terrorisme No. 15/2003, di DPRRI, pada 9 Juni 2016.

¹⁴⁴ Lihat *Media Indonesia*, 18 April 2016.

mencegah, menangkap, dan memerangi aksi-aksi terorisme, para teroris akan memperoleh kesempatan lebih besar lagi untuk melaksanakan rencana-rencana mereka.

Dalam rangka peningkatan kinerja aparat penegak hukum, juga perlu dilakukan audit atas kinerja BNPT. Hal ini logis, mengingat telah banyak dikeluarkan pembiayaan yang bersumber dari uang rakyat (APBN) dalam perang melawan terorisme, selain bantuan asing, yang diberikan lewat pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama intelijen. Langkah ini menjadi penting untuk menghilangkan sinisme, dan sebaliknya, memperbaiki pandangan masyarakat Indonesia, untuk mengembalikan kepercayaan serta meraih simpati dan dukungan lebih besar, demi keberhasilan, dalam perang melawan terorisme internasional, khususnya ISIS/IS.

Lemahnya pengawasan parlemen atas kinerja aparat dan absennya perbaikan kinerja aparat penegak hukum dari dalam, tidak hanya aparat kepolisian, tetapi juga petugas lapas, justru dapat meningkatkan radikalisasi para pendukung dan simpatisan terorisme internasional di tanah air. Sebaliknya, sikap kontraproduktif DPR yang menentang isolasi tokoh penyebar ideologi kekerasan dan aksi-aksi terorisme atas nama Islam, dapat menggagalkan kesuksesan pemerintah dalam perang melawan terorisme.¹⁴⁵ Mereka yang telah diidentifikasi sebagai perencana teror Sarinah di penjara Nusakambangan, walaupun karena alasan umur atau kesehatan, tidak mungkin terus dibiarkan menyebarkan ajaran kekerasan dan aksi-aksi terorisme atas nama agama melalui ceramah-ceramah mereka. Mereka tidak mungkin disatukan dengan tahanan serupa dan bersama dengan tahanan lainnya yang mudah dipengaruhi untuk melakukan kegiatan serupa. Sebab, secara realistis, ceramah guru agama tokoh ISIS/IS Indonesia, sangat mempengaruhi, tahanan kriminal biasa, seperti Basri, asal Lapas Ampana, Poso, yang kemudian bergabung dengan Kelompok Santoso. Kasus yang sama

terjadi pada Alif, mantan napi kriminal Aceh, yang kemudian beraksi dalam Bom Sarinah, setelah terpengaruh (ceramah-ceramah) Abu Bakar Basyir dan Aman Abdurrahman di Lapas Nusakambangan. Sehingga, perlu hati-hati dengan pemanfaatan alasan “demi perlindungan HAM dan implementasi demokrasi,” yang bisa disalahgunakan untuk melindungi para penyebaran pelaku ajaran dan ideologi terorisme, khususnya yang bersumber dari penjara, dan melanjutkan aksi-aksi terorisme berikutnya (di masa depan).

Penyelidikan atas Kasus Sarinah oleh aparat telah menyingkap bahwa mereka yang tertangkap terkait itu adalah eks napi curanmor (pencurian kendaraan bermotor), pencurian ringan dan lain-lain, yang pernah berkomunikasi dengan napi teroris, termasuk Santoso, sewaktu di Lapas Palu dan Poso, serta Nusakambangan.¹⁴⁶ Kondisi lapas yang tidak memadai telah menjadikan lapas sebagai tempat berkumpul dan membuat perencanaan aksi-aksi terorisme yang terjadi belakangan, termasuk pelatihan militer di Janto tahun 2010, yang direncanakan dari Lapas Cipinang tahun 2010.¹⁴⁷ Untuk alasan inilah, mengapa, Ketua BNPT, Komjen (Pol) Tito Karnavian, berpendapat, untuk mencegah penyebaran ideologi dan perencanaan aksi-aksi terorisme baru, para napi teroris harus ditahan dalam penjara yang sesuai dengan kondisi pengamanan yang maksimum (*maximum security*).¹⁴⁸ Tetapi, bukan berarti kondisi lapasnya harus meniru model lapas untuk napi teroris AS di Guantanamo, Kuba, begitu pula dalam penanganannya.

Lemahnya penegakan hukum secara nyata tampak pula belakangan di bandara, terkait pemeriksaan imigrasi atas orang-orang yang baru turun dari pesawat asal luar negeri dan akan memasuki wilayah Indonesia. Apa yang telah diperlihatkan Lion Air JT 161 Singapura-Jakarta pada 10 Mei 2016 dengan membawa para penumpang asal mancanegara ke jalur terminal domestik bandara Soekarno-Hatta,

¹⁴⁵ Lihat, Indra Widjaya, “Pengisolasian Ba’asyir Akan Diadukan ke DPR: DPR akan meminta penjelasan Dirjen Pemasyarakatan,” *Koran Tempo*, 15 April 2016, h. 9.

¹⁴⁶ “BNPT: Indonesia Butuh Lapas *Maximum Security*,” *Suara Pembaruan*, 14 April 2016, h. 4, *loc. cit.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

sehingga para penumpang bisa langsung lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi, tidak boleh terulang lagi. Kelalaian semacam ini akan rawan dimanfaatkan secara langsung oleh kaum teroris atas rencana aksi-aksi terorisme dan pelanggaran hukum lainnya yang akan mereka lakukan di Indonesia. Ancaman kian meningkat jika penumpang di dalamnya berasal dari wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai sebagai negara asal para aktor non-negara pelaku teroris internasional.¹⁴⁹

III. Penutup

Indonesia, dengan kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan, menyediakan lahan yang subur bagi tumbuhnya gerakan dan aksi-aksi kekerasan teroris internasional pro-ISIS/IS. Karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi menjadi hal tidak terpisahkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Sementara, kondisi masyarakat Indonesia dengan budaya belajar dan daya kritis yang juga masih lemah, sekalipun media cetak dan *online* dan *gadgets* sudah tersedia dan bertebaran di sana-sini, membuat para aktivis, pendukung dan simpatisan ISIS terlindungi dalam menjalankan kegiatan mereka. Walaupun kondisinya sudah lebih maju dibandingkan dengan di akhir tahun 1990 dan di awal dasawarsa 2000, sikap *permissiveness* atas apa yang telah dilakukan para aktivis ISIS/IS dengan serangan terorisme mereka masih tampak di masyarakat, seperti dalam kasus serangan terorisme ISIS/IS tengah berlangsung di Sarinah-Thamrin, dan juga sesudahnya.

Masih rendahnya budaya ingin tahu, dan juga sikap toleran terhadap budaya kekerasan atas nama agama kian mendukung Indonesia sebagai lahan subur dan surga bagi berkembangnya ISIS/IS, konservatisme ideologi dan kampanye kekerasan agama yang dilakukannya. Sehingga, ironis sekali, sementara di negara maju aksi terorisme

internasional ISIS/IS langsung dikecam ramai-ramai, dan tidak mendapat tempat sama sekali di hati masyarakat negeri yang menjadi korban, di Indonesia masih muncul sikap ambivalen, gamang, dan tidak jelas, jika tidak ingin mengatakan masih tampaknya sikap simpati terhadap aksi-aksi ISIS/IS.

Meningkatnya pengaruh ISIS/IS, dengan meningkatnya pengikut, pendukung, dan simpatisan organisasi teroris internasional global itu, yang meningkatkan ancaman terorisme di Indonesia, sesungguhnya memperlihatkan tidak berhasilnya aksi deradikalisasi untuk menghentikan aksi para pelaku terorisme. Langkah deradikalisasi telah dilakukan pasca-Bom Bali 2002, agar para pelaku dapat dikoreksi dari cara berpikir yang keliru. Namun, hal ini dapat dinilai gagal, dengan keterlibatan Afif alias Sunakim, mantan napi teroris Aceh dan pengikut Dulmatin, Amrozi dan kawan-kawan, dalam serangan pada 14 Januari 2016 lalu. Lapas dalam kenyataannya telah menjadi tempat penyebaran propaganda ISIS/IS dan perekrutan pengikut baru, yang dilakukan oleh para tokoh garis keras yang sudah berbait pada ISIS/IS, seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman. Teknologi berbagai jenis *gadgets* dengan media daring mereka telah membantu sukses propaganda dan radikalisasi para pengikut, pendukung dan simpatisan baru ISIS/IS di Indonesia.

Upaya deradikalisasi atau kontra-ideologi kaum teroris yang efektif perlu dilakukan dengan mendukung kampanye Islam moderat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, langkah mengajarkan dan menyebarkan *fiqih* anti-terorisme menjadi solusi untuk menghentikan penyebaran narasi, propaganda, ideologi, ajaran, dan radikalisasi yang terus dilancarkan ISIS/IS. *Fiqih* anti-terorisme ini bukan sesuatu yang baru, karena merupakan kontinuitas dan pengembangan dari diskursus *fiqih* mengenai keragaman yang telah digulirkan sejak pertengahan tahun 2015 lalu, seperti pernah diungkap Fajar Riza Ul Haq di *Kompas*, 7 Mei 2016.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia perlu lebih kritis dan selektif terhadap segala

¹⁴⁹ Sempat diberitakan *Kompas*, 17 Mei 2016: 3, terdapat 2 warga asing etnis Uighur yang menggunakan identitas Indonesia, yang ditangkap pihak imigrasi dalam kasus Lion Air Singapura-Jakarta.

bentuk bantuan yang masuk dari negara-negara yang selama ini berperan dalam menyalurkan bantuan keuangan, yang telah berdampak pada maraknya pemahaman Islam yang keliru dan meningkatnya radikalisme di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama. Upaya mendasar lainnya adalah perlunya perbaikan dalam metode pengajaran agama, terutama terkait dengan isu-isu hukum, di berbagai institusi pendidikan tradisional, seperti pesantren dan madrasah.

Pelibatan banyak tokoh dan organisasi Islam moderat dalam melakukan kontra-narasi terhadap kegiatan para teroris yang telah menyalahgunakan ajaran Islam dapat efektif mengurangi maraknya penyebaran ajaran dan ideologi kekerasan ISIS/IS di Indonesia. Para tokoh organisasi dan pemuka agama yang moderat tersebut dapat berperan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang tidak ditafsirkan secara keliru, tidak sebatas ceramah di masjid-masjid, tetapi juga di seminar-seminar dan berbagai forum publik, serta di dunia maya atau media sosial. Sedangkan untuk merespons kesulitan aparat melakukan kegiatan kontra-ideologi, akibat indoktrinasi ajaran Wahabi/Salafi yang mendalam pada para pengikut, simpatisan, dan pendukung ISIS/IS, dibutuhkan khusus guru agama dengan kapasitas khusus, yang sangat bijak dan cerdas untuk dapat mendukung suksesnya deradikalisasi yang dilakukan bersama aparat negara, seperti Polri, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, di wilayah-wilayah keras, seperti Poso, Solo, Yogyakarta, Lamongan, dan Bima. Juga, perlu direkomendasikan adanya lapas dan ulama khusus untuk langkah deradikalisasi para tokoh, pelaku, pendukung dan simpatisan, dan sebaliknya, mencegah penyebaran ideologi kelompok radikal Islam dan aksi-aksi terorisme mereka.

Perubahan *modus operandi* yang dilakukan para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS yang harus dapat direspons aparat keamanan Indonesia. Jika tidak, ISIS/IS dapat lebih mudah dan lebih banyak lagi mencari pelaku baru aksi-

aksi terorisme, dengan sasaran korban yang jauh lebih luas dan banyak. Sehingga, logis, dibutuhkan revisi terhadap UU terkait, antara lain, UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, Bambang. *Teror Bom Azahari-Noor Din*. Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Adjie S. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Agus SB. *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Assad, Muhammad Haidar. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahi-ra, 2014.
- Berman, Eli. *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*, Massachusetts, MIT Press, 2011.
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor, 2010.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: YPKIK, 2009.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Jones, David Martin. *Globalisation and the New Terror: The Asia Pasific Dimension*, Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

- Kahfi, Syahdatul. *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Spectrum, 2006.
- Lister, Charles R. *The Syrian Jihad*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Mabon, Simon. *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*. London and New York: IB Tauris, 2016.
- Maher, Shiraz. *Salafi-Jihadism: The History of an Idea*. Oxford, 2016.
- Neumann, Peter R. *Options and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States*. London: King's College, 2013.
- Nye, Jr., Joseph S. *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*. New York: Longman, 2003.
- Simonsen, Clifford E. and Jeremy R. Spindlove. *Terrorism Today: The Past, the Players, the Future*. New Jersey: Prentice-Hall 2004.
- Singh, Daljit. *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Smelser, Neil J. and Faith Mitchell (eds.). *Terrorism: Perspectives from the Behavioral and Behavioral Sciences*. Washington DC: The National Academies Press, 2001.
- Snowden, Lynne L. and Bradley C. Whitsel. *Terrorism: Research, Readings, and Realities*. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
- Stern, Jessice. *Terror in the Name of God: Why Religious Militant Kills*. New York Harper Collins, 2003.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Second Edition, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Whitetaker, David J. *Terrorist and Terrorism in the Contemporary World*. London: Routledge, 2004.
- White, Jonathan R. *Terrorism and Homeland Security*. USA: Wadsworth, 2012.